

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan, tidak terkecuali di daerah diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan tersebut harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Senyampang dengan hal tersebut maka hal ikhwal tentang narasi dan diskursus diskriminatif yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan.

Salah satu bentuk dari diskriminasi yang mengakibatkan kesenjangan adalah adanya diskriminasi gender. Diskriminasi gender seperti dimaksud merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan. Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus peran bidang domestic dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (gap) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di Daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa.

Kabupaten Sleman dengan porsi jumlah penduduk yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak lepas dari dinamika dan



tantangan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalam pembangunan daerah. Berdasarkan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017 menempatkan Kabupaten Sleman mendapatkan nilai tertinggi di DIY dengan Indeks sebesar 95.62 naik dari tahun 2016 sebesar 95.51. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan data komposit yang membandingkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di bidang kesehatan, pendidikan dan kegiatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dari angka IPG tersebut diketahui bahwa meskipun dapat dikatakan kesenjangan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sleman semakin menipis, namun tak dapat dipungkiri kesenjangan tersebut masih ada, dan jika tidak dikelola dengan baik maka tidak menutup kemungkinan tingkat kesenjangan tersebut dapat kembali meningkat dan berpotensi besar dalam memunculkan persoalan-persoalan sosial.

Kemudian apabila dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Sleman di tahun 2017 juga menempati urutan pertama di DIY dengan angka sebesar 79.51. IDG tersebut diukur berdasarkan partisipasi perempuan dalam pembangunan khususnya dalam parlemen, sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Di ketiga klaster partisipasi tersebut dapat dikatakan secara umum dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan terkecuali dalam hal sumbangan pendapatan. Tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai kehidupan sosial menjadi penting untuk diafirmasi agar menciptakan kesetaraan di kalangan laki-laki dan perempuan. Namun demikian upaya tersebut masih memiliki tantangan karena kuatnya kultur sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai subyek dengan peran domestik dan reproduksi sebagai peran dominannya. Selain itu persepsi bahwa pekerjaan dan penghasilan perempuan diluar tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga hanya untuk membantu ekonomi keluarga, membuat peluang perempuan dengan penghasilan yang tinggi menjadi berkurang.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Sleman perlu disikapi



dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistik agar persoalan kesenjangan di Kabupaten Sleman dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sleman diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten Sleman, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Permendagri Nomor 15 tahun 2008 pasal 15 huruf k mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Kabupaten Sleman perlu menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Sleman diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

B. Dasar Hukum

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) di kabupaten Sleman memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9. Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dilakukannya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring–evaluasi (monev) pembangunan yang responsif gender.
2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender .



3. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan strategi PUG.

D. Proses Penyusunan

Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sleman dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Sleman. Kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender meliputi:

1. Identifikasi dan analisa Isu-Isu strategis terkait dengan gender dan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman
2. Melakukan diskusi terarah (*focus group discussion*) dalam sinkronisasi program dan memberi masukan rencana aksi yang diturunkan dari program-program strategis (5 tahun) di masing-masing Perangkat Daerah
3. Menyusun indikator target capaian tahunan (selama 5 tahun) rencana aksi daerah pengarusutamaan gender
4. Menyusun instrument monitoring dan evaluasi RAD PUG
5. Menyusun draft awal (rancangan) dokumen RAD PUG
6. Melakukan FGD dalam rangka desiminasi/sosialisasi draft awal RAD PUG
7. Penyelarasan akhir dan finalisasi dokumen RAD PUG di Kabupaten Sleman.

E. Sistematika Penulisan

RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Penulisan
- F. Kegunaan

BAB II PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- A. Kedudukan PUG dalam Peraturan PerUndang-Undangan di Daerah
- B. Kedudukan PUG dalam Pembangunan di Kabupaten Sleman



- C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPJMD)
- D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

BAB III ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SLEMAN

- A. Gambaran Umum Geografis, Kependudukan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sleman
 - 1. Kondisi Geografis dan Kependudukan
 - 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- B. Analisis Isu Gender Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Sleman
 - 1. Umur Harapan Hidup
 - 2. Umur Perkawinan Pertama
 - 3. Angka Kematian Ibu dan Bayi
 - 4. Partisipasi Dalam Ber-KB
 - 5. Penolong Persalinan, Pemberina ASI dan Imunisasi
 - 6. Derajat Kesehatan Penduduk
- C. Analisis Isu Gender dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman
 - 1. Angka Partisipasi Sekolah
 - 2. Angka Putus Sekolah
 - 3. Harapan Lama Sekolah
 - 4. Rata-Rata Lama Sekolah
 - 5. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
- D. Analisis Isu Gender dalam Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Sleman
 - 1. Pendapatan Regional
 - 2. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran
 - 3. Lapangan, Status Pekerjaan dan Jam Kerja
- E. Pembangunan Gender di Kabupaten Sleman
 - 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - 3. Partisipasi Perempuan

BAB IV RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

- A. Dukungan Politik Penyelenggaraan PUG
- B. Tujuan dan Sasaran Pengarusutamaan
- C. Kebijakan Penyelenggaraan PUG
- D. Kelembagaan PUG
- E. Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG
- F. Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender
- G. Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- H. Matriks Rencana Aksi dan Indikasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- I. Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

BAB V PENUTUP

F. Kegunaan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dapat digunakan sebagai Kegunaan RAD PUG Kabupaten Sleman adalah



menjadi pedoman bagi seluruh PD di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.



BAB II

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Kebijakan Implementasi PUG di Kabupaten Sleman

Pengarusutamaan Gender menjadi suatu strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan baik dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Secara umum terdapat dua pedoman kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengarusutamaan gender khususnya di Kabupaten Sleman yaitu: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dua peraturan tersebut memberikan 2 (dua) substansi pokok dalam konteks pengarusutamaan gender yaitu :

1. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta pelebagaan pengelolaan PUG

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bidang-bidang pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupatens Sleman dapat mencerminkan pendekatan responsive gender. Manifestasi dari pendekatan responsif gender dalam pembangunan diwujudkan melalui pemenuhan hak partisipasi, akses, kontrol dan manfaat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program maupun kegiatan pembangunan.



Untuk meningkatkan akselerasi dalam implementasi PUG di Kabupaten Sleman, maka dibentuk suatu kelembagaan PUG berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 6/Kep.KDH/A/2017 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman. Kelompok Kerja (POKJA) ini merupakan instrument kelembagaan PUG yang berperan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Sleman. Selain itu adanya POKJA PUG juga menjadi indikasi dukungan dan komitmen Kabupaten Sleman untuk segera mengintegrasikan pendekatan responsif gender pada setiap aspek pembangunan daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut POKJA pengarusutamaan gender memiliki tugas sebagai berikut:

Untuk mendukung tugas tersebut maka POKJA pengarusutamaan gender diisi oleh personalia yang merupakan perwakilan dari Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Dapat dikatakan bahwa POKJA tersebut bersifat lintas Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

B. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Kabupaten Sleman

Siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sleman menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

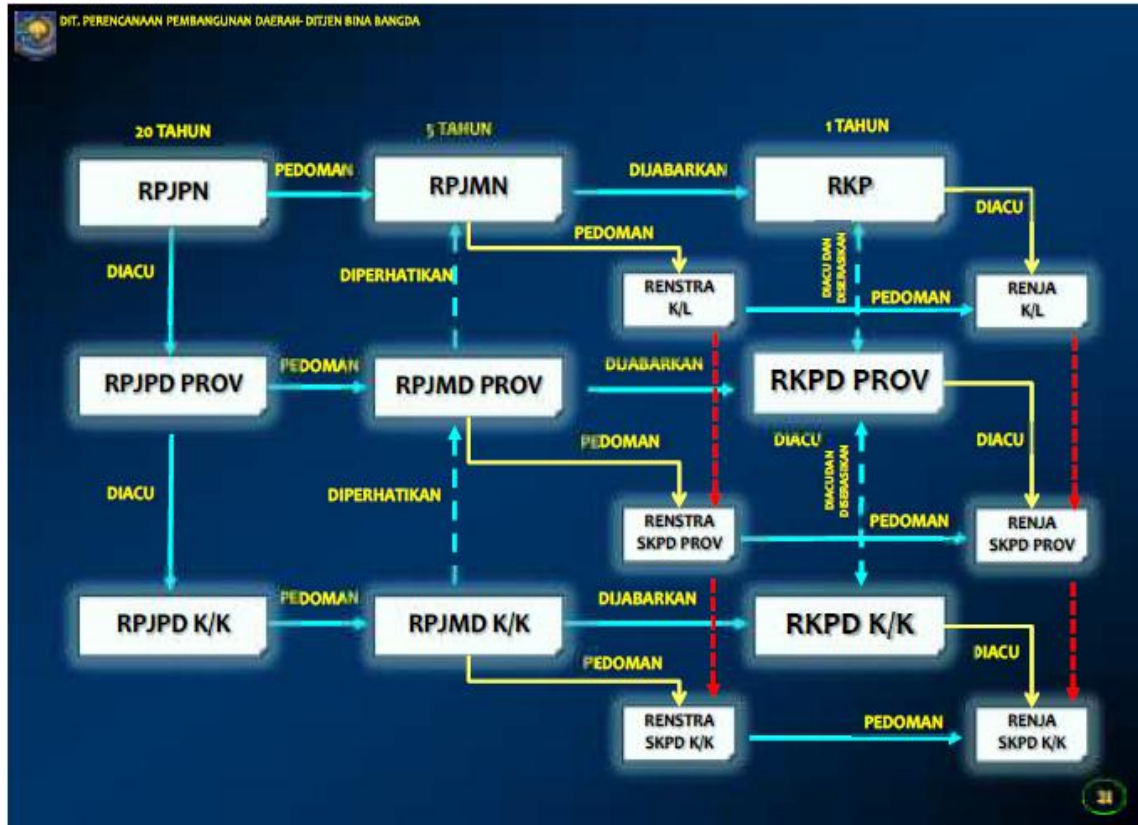
Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),



dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di Perangkat Daerah (PD) disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (PD) (RKA-PD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan pendekatan responsive gender dalam pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Dengan demikian maka setiap orang khususnya perempuan memiliki hak dalam berpartisipasi, akses, kontrol dan menerima manfaat dari proses pembangunan. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008). Dengan proses tersebut maka diharapkan kesenjangan proses dan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi. Siklus perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dapat lihat pada alur dibawah ini:





Sumber: Bappenas, 2011

Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-SKPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD .

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender (PPRG) harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin).



Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. Perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/ proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Berdasarkan buku pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2010, metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah dapat dilihat dalam matriks dibawah ini:

Tabel 1: 9 tahap Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan/Sub-kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan apa yang menjadi tujuannya	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin dan atau mengandung isu gender (kuantitatif/ kualitatif)	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan apakah ada hubungannya dengan tidak terakomodasinya 4 faktor (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat) atau salah satu dari faktor2 tsb bagi sebagian target sasaran yang berbeda jenis kelamin.	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukenali isu gender di eksternal lembaga (di luar unit kerja; disektor lain, di masyarakat target	Rumuskan kembali yang menjadi tujuan (seperti tercatat di kolom 1) agar menjadi responsif gender.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan atas isu yang teridentifikasi di kolom 3, 4 dan 5, susun rencana aksi / kegiatan yang responsif gender Rencana aksi itu bisa <i>single year</i>, bisa juga <i>multiyears</i> 	Tetapkan <i>base-line</i> . Bisa dipilih dari kolom 2, yang relevant dengan tujuan serta apa yang mau diukur keberhasilan.	Tetapkan indikator gender, yang sifatnya: <ul style="list-style-type: none"> Menghilangkan/ menurunkan kesenjangan Merubah perilaku (termasuk dalam merencanakan program kegiatan) yang bias gender Merubah nilai yang responsif gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pada aspek pelaksanaan pembangunan, terintegrasinya pengarusutamaan gender berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara



laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG maka POKJA PUG dapat secara aktif mengawal dengan senantiasa memantau pelaksanaan PUG pada program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu pada tataran intern Perangkat Daerah perlu dibentuk focal point yang merupakan penghubung (*laison officer*) antara POKA PUG dan instansi yang bersangkutan. Dapat dikatakan focal point PUG di masing-masing Perangkat Daerah merupakan ujung tombak dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pada tahap evaluasi, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang responsif gender. Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah hasil proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman apakah sudah berdampak pada penurunan atau bahkan hapusnya kesenjangan antara laki-laki atau perempuan atau belum, serta dilengkapi dengan analisa tentang dinamika PUG baik dari sisi *lesson learn*, hambatan, peluang dan tantangannya.

C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPJMD)

Kedudukan PUG ke dalam RPJMD di Kabupaten Sleman diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang (proporsional). Perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam dalam RPJMD perwujudannya diawali melalui perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu mendasarkan diri pada data pilah terkait dengan kondisi kesetaraan laki-laki dan perempuan minimal pada



bidang Pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan issue gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada di Kabupaten Sleman.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini karena RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Sleman. Kesemuanya itu tentulah mendasarkan diri sebagaimana yang tersebut dalam misi Bupati dan Wakil Bupati yang ke 5 yaitu: **"Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional"**. Hal ini sekaligus menjadi komitmen politik pembangunan yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda pembangunan yang harus diwujudkan.

D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama (*mainstreaming*) dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang bersifat tahunan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh Perangkat Daerah (PD) . APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD). Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, Perangkat Daerah (PD) perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.



Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam pembangunan tahunan harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah (PD). Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran dan indikator suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.



BAB III

ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SLEMAN

A. Gambaran Umum Geografis, Kependudukan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sleman

1. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Indonesia. Luas Wilayah Kabupaten Sleman 7574,82 km² atau 18% dari luas Wilayah DIY, terbentang diantara 110033'00" dan 11013'00 Bujur Timur,serta 7o34'51" dan 7o47'03" Lintang Selatan. Di sebelah Utara, perbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali,disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang, dan disebelah Selatan berpatasan dengan Kota Yogyakarta,Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Secara administratif,terbagi atas 17 Kecamatan 86 Desa dan 1.212 Padukuhan.

Jumlah penduduk suatu wilayah atau daerah selain dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk. Perkembangan kependudukan khususnya yang berkaitan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman,

dapat dilihat dari data yang diperoleh dari hasil sensus, estimasi, proyeksi, dan survei yang dilaksanakan secara nasional maupun dari pencatatan dan pelaporan administrasi instansi (registrasi penduduk).

Tabel 2: Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Sleman 2011-2016

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2011	560.146	49,70	566.742	50,30	1.126.888
2	2012	564.978	49,71	571.624	50,29	1.136.602
3	2013	521.444	49,79	525.881	50,21	1.047.325
4	2014	539.731	50,78	523.071	49,22	1.062.802
5	2015	538.074	50,05	537.052	49,95	1.075.126
6	2016	542,510	50,23	536,700	49,77	1,079,210

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

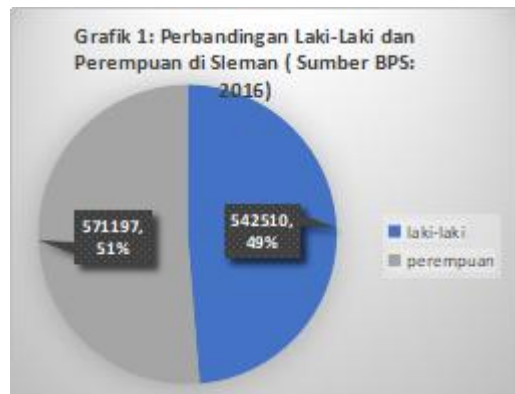
Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 1.075.126 jiwa. Berdasarkan data semester II Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat sebesar 1.079.210



jiwa. Dinamika jumlah penduduk di Sleman banyak dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk. Naik atau turunnya minat mahasiswa dari luar D.I. Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di D.I. Yogyakarta.

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman tersebut diatas belum termasuk mahasiswa yang belajar di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Sleman. Banyaknya mahasiswa pada perguruan tinggi yang ada di Sleman, senyatanya menambah jumlah orang yang ada di Sleman yang tentu saja akan menambah kepadatan pada wilayah tertentu.

Dari data penduduk terlihat, jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dapat dikatakan hampir seimbang.



Tabel 3 : Capaian Layanan Kependudukan Tahun 2016

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Capaian Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100,00%
Capaian penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99,23%	95,97%	96,71%
Capaian penerbitan Kuripan Akte Kelahiran	88,00%	86,77%	98,60
Capaian penerbitan Akte Kelahiran	56%	61,89%	110,51%

© Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini menuntut perlakuan yang sama kepada jenis keduanya untuk mencapai Indeks Pembangunan Gender yang sudah ditargetkan.

Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman berdampak pada layanan kependudukan yang dituntut harus optimal. Dilihat dari peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, capaian kinerja di bidang kependudukan adalah sebagai berikut:



2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman

Salah satu variabel untuk menguji keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat capaian pembangunan manusia. Manusia harus ditempatkan sebagai unsur esensial baik dalam proses maupun orientasi hasil dari pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan secara masif adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Proses pembangunan manusia difokuskan pada upaya partisipasi dan pemberdayaan penduduk sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Semakin besar nilai IPM berarti kualitas pembangunan manusianya semakin baik. Berdasarkan kuantifikasi yang ditetapkan oleh BPS, Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar antara 0 hingga 100. Nilai IPM yang dihasilkan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayahwilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Keempat kategori tersebut adalah: nilai IPM kurang dari 60 dikategorikan IPM rendah, rentang antara 60 hingga 69 dikategorikan IPM sedang, rentang antara 70 hingga 79 dikategorikan IPM tinggi, dan nilai IPM 80 ke atas dikategorikan IPM sangat tinggi.

Bedasarkan data BPS Kabupaten Sleman, dalam kurun empat tahun terakhir, IPM Kabupaten Sleman selalu mengalami peningkatan. Tabel 3 menunjukkan nilai IPM yang meningkat dari tahun 2014 sebesar 80,73 meningkat menjadi 82,85 di tahun 2017 yang berarti terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam empat tahun terakhir. Menurut kategori di atas, maka IPM Kabupaten Sleman



termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi, yakni kelompok dengan nilai IPM 80 ke atas. Dilihat dari komponen pembentuknya, hasil penghitungan IPM Kabupaten Sleman tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk semua komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks kesehatan relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,84. Indeks pendidikan naik menjadi

Tabel 4: IPM Kabupaten Sleman 2014-2016

No. Urut	Uraian	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komponen IPM					
1.	Human Development Index (HDI)	74,22	75,22	76,80	78,48
2.	Human Development Index (HDI)	15,64	15,77	16,60	16,68
3.	Human Development Index (HDI)	13,98	14,90	16,64	16,85
4.	Pengeluaran per kapita (Rp) GPPB	14.370	14.367	14.971	15.565
Indeks IPM					
1.	Kesehatan	0,84	0,84	0,84	0,84
2.	Pendidikan	0,78	0,78	0,80	0,81
	Indeks Human Development	0,87	0,88	0,89	0,92
	Human Development Index	0,69	0,69	0,71	0,71
3.	Pengeluaran	0,81	0,82	0,82	0,83
	IPM	80,73	81,20	82,15	82,85

0,81 pada tahun 2017. Indeks pengeluaran juga naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,83.

Dalam memaknai perkembangan nilai IPM perlu juga melihat pencapaian IPM kabupaten/kota yang lain.

Untuk melihat pencapaian IPM Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta dan peringkat nasional, berikut ini disajikan IPM Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dan Indonesia tahun 2017.

Secara nasional dibandingkan dengan provinsi lainnya di

Tabel 5: Perbandingan IPM di DIY

Kabupaten/Kota	Nilai IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)
1. Kulonprogo	73,73	4
2. Bantul	78,67	3
3. Gunungkidul	68,73	5
4. Sleman	80,85	2
5. Yogyakarta	80,49	1
D.I. Yogyakarta	78,89	2*)
Indonesia	70,81	-

*Data : BPS
*) Secara nasional dengan perbandingan dengan 34 provinsi

Indonesia, IPM D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 menduduki peringkat kedua, relatif stabil jika dibanding peringkat tahun sebelumnya. Dalam perbandingan antar kabupaten/kota se D.I. Yogyakarta, IPM



Kabupaten Sleman menduduki peringkat dua setelah Kota Yogyakarta.

B. Analisis Isu Gender Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Sleman

Arah dari pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Sleman adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat dari setiap orang. Hal ini menjadi investasi dalam pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan, sehingga memunculkan kondisi yang produktif dan unggul. Untuk mencapai upaya tersebut maka pembangunan kesehatan di Kabupaten Sleman melandaskan diri pada upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, dengan tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih mengetahui perkembangan dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar kesehatan di Kabupaten Sleman yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini:

1. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sedangkan umur harapan hidup pada waktu lahir (e_0) adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program penanggulangan kemiskinan.



Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang sehingga mempunyai usia harapan hidup yang tinggi.

Umur harapan hidup penduduk Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah 74,63 tahun, ada sedikit kenaikan bila dibandingkan tahun 2016. Angka ini mengadung arti bahwa anak yang lahir pada tahun 2017 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 74,63 tahun. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa umur harapan hidup perempuan (76,53 tahun) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (72,74 tahun).

Tabel 6: Umur Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman 2014-2017

Tahun	Perempuan	Laki-Laki	Laki-Laki + Perempuan
2014	76,39	72,43	74,47
2015	76,39	72,53	74,57
2016	76,50	72,71	74,60
2017	76,53	72,74	74,63

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Pada tingkat Provinsi D.I. Yogyakarta, umur harapan hidup di Kabupaten Sleman tertinggi kedua setelah Kabupaten Kulonprogo. Umur harapan hidup Kabupaten Kulon Progo mencapai 75,06 tahun, dengan komposisi 77,00 tahun untuk perempuan dan 73,19 untuk laki-laki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas hidup penduduk Sleman relative lebih baik dibandingkan dengan banyak daerah lain di Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki. Tingginya angka harapan hidup tahun 2017 ini tidak terlepas dari keberhasilan program-program kesehatan terutama peningkatan akses kesehatan masyarakat kurang mampu melalui program jaminan kesehatan.



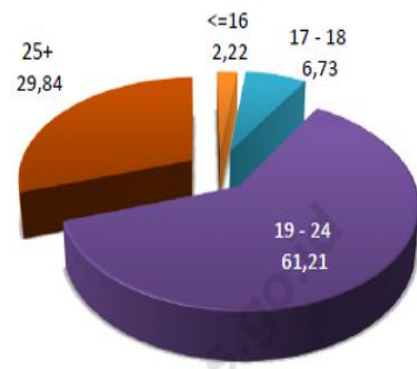
2. Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu faktor penting yang perlu dicermati untuk melihat tingkat kesehatan perempuan dan tingginya angka kelahiran. Umur perkawinan pertama bagi perempuan akan sangat menentukan besarnya peluang (*probability*) seorang ibu melahirkan anak-anak mereka. Semakin muda usia perkawinan pertama seorang ibu, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh anak. Disisi lain proses kehamilan dan melahirkan berkaitan erat dengan kesehatan seorang ibu dengan anak yang dikandung dan dilahirkan nantinya. Kesehatan ibu dan anak akan sangat tergantung pada kesiapan perkawinan yang dilakukan, khususnya kesiapan reproduksinya.

Dari grafik menunjukkan komposisi umur perkawinan pertama perempuan. Tampak bahwa sebagian besar perempuan melakukan perkawinan pertamanya pada umur 19-24 tahun yaitu sebesar 53,98 persen. Adapun mereka yang kawin pada umur 16 tahun ke bawah tercatat sekitar 3,79 persen dan yang kawin pada umur 17-18 tahun sebesar 11,59 persen. Sedangkan perempuan yang kawin pada umur 25 tahun atau lebih mencapai 30,64 persen.

Fakta tentang umur pertama perkawinan tidak bisa dilepaskan dari problem yang muncul dari pernikahan pertama pada usia masih anak (dibawah 18 tahun). Usia dibawah 18 tahun khususnya anak perempuan secara kesehatan masih dikategorikan terlalu dini dan belum siap secara fisik, psikis, dan reproduksi. Hal tersebut dapat berdampak buruk baik bagi anak perempuan yang menikah, anak yang dikandung nantinya, dan keluarga yang rapuh. Kondisi perkawinan usia anak ini berkontribusi besar terhadap munculnya berbagai persoalan sosial karena tidak adanya ketahanan keluarga

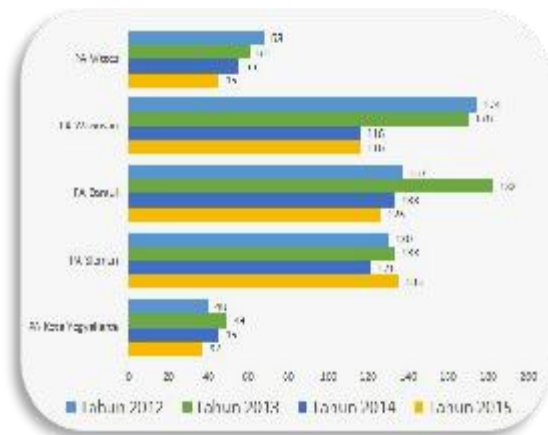
Grafik 2 : Grafik Presentase Usia Perkawinan (sumber: Susenas 2017)



didalamnya. Kabupaten Sleman masih memiliki problem terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan data, angka perkawinan di Kabupaten sleman tidak bisa dibilang kecil Terjadinya pernikahan di bawah umur dalam tiga tahun jumlahnya meningkat, misalnya pada 2014 mencapai 109, pada 2015 sebanyak 132 dan pada 2016 hingga September mencapai 79.

Grafik 3: Perbandingan Angka Perkawinann Usia Anak DIY

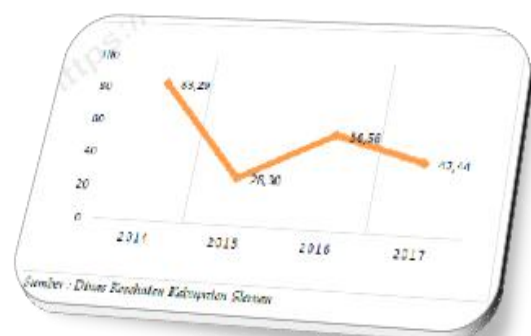


Jika diperhatikan angka sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Sleman memiliki angka pernikahan usia anak tertinggi dibanding daerah lain di DIY. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, karena persoalan-persoalan terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan akan sangat mungkin dimulai dari pernikahan yang belum siap (pernikahan anak).

3. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Angka kematian ibu atau biasa disebut *Maternal Mortality Rate* (MMR) merupakan jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Grafik: Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sleman, 2014-2017 (per 100.000 kelahiran hidup)

Grafik 4: Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sleman tahun 2014-2017 (Per 100.000 kelahiran hidup)



Jumlah kasus kematian ibu selama periode 2014-2017 di Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup fluktuatif. Pada tahun 2016



kasus kematian ibu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, yaitu dari 28,30 pada tahun 2015 menjadi 56,58 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, kasus kematian ibu turun menjadi 42,44. Hal ini menjadi *warning* bagi semua pihak di Kabupaten Sleman, jika masalah kasus kematian ibu pada saat mengandung atau persalinan tidak mendapatkan perhatian maka ada kemungkinan lebih besar meningkatnya angka kematian ibu di Kabupaten Sleman. Angka kematian ibu juga sekaligus menggambarkan bahwa pada konteks kesehatan khususnya reproduksi perlu adanya upaya afirmatif terhadap perempuan agar kualitas kesehatan dapat meningkat.

Kemudian terkait dengan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan *variable* yang dapat mengukur tingkat kesehatan dalam masyarakat. Lebih spesifik adalah terkait dengan kondisi kesehatan dan gizi perempuan terutama dimasa kehamilan, melahirkan dan masa nifas.

Berdasarkan ketentuan dari Dinas Kesehatan Angka kematian bayi atau disebut juga sebagai *Infant Mortality Rate (IMR)* didefinisikan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, AKB dari tahun ke tahun cenderung menurun. AKB pada tahun 2017

mencapai 4,21, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 3,11. AKB sebesar 4,21 mengandung arti bahwa ada sekitar 4 bayi usia 0 tahun yang meninggal dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Angka kematian bayi yang masih saja terjadi menjadi suatu

Grafik 5 : Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sleman tahun 2014-2017 (Per 1000 Kelahiran hidup)



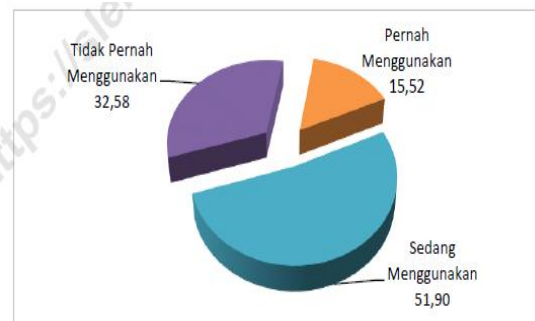
tantangan untuk segera diatasi. Hal ini harus menjadi perhatian bersama oleh semua pihak di Kabupaten Sleman agar kematian bayi karena faktor masalah kesehatan tidak terjadi kembali.

4. Partisipasi Dalam Ber-KB

Keluarga berencana (KB) merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Program KB menjadi indikator gender yang cukup menarik. Alat KB modern yang dikhususkan bagi perempuan seperti MOW, AKDR/IUD, kondom wanita, suntik, susuk dan pil, sedangkan bagi pria hanya tersedia MOP dan kondom pria. Penolong Persalinan, Pemberian ASI dan Imunisasi. Namun demikian sejak program KB dicanangkan oleh pemerintah, pengguna/pemakai alat/cara KB lebih banyak melibatkan peran perempuan daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kesadaran yang rendah dari laki-laki untuk aktif dalam program KB.

Pada tahun 2017 di Kabupaten Sleman, perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB mencapai sekitar 51,90 persen. Artinya bahwa dari setiap 100 orang perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin, ada sekitar 52 perempuan sedang/aktif menggunakan KB modern atau cara tradisional. Sedangkan perempuan pernah kawin yang sama sekali tidak pernah menggunakan alat/cara KB ada sebanyak 32,58 persen Grafik 5 memperlihatkan bahwa alat/cara KB yang ada digunakan oleh perempuan pernah kawin usia 15-49

Grafik 6: Presentase perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Keikutsertaan KB di Kabupaten Sleman tahun 2017



Sumber : Susenas 2017



tahun. Alat KB modern umumnya lebih banyak digunakan oleh perempuan, sedangkan laki-laki hanya menggunakan vasektomi dan kondom. Alat KB modern yang paling banyak digunakan yaitu IUD/AKDR/spiral mencapai sekitar 31,18 persen. Sementara itu, metode KB yang jarang digunakan adalah sterilisasi pria/MOP, yang hanya sekitar 0,43 persen.

Dalam memberikan efek akselerasi terhadap apa yang menjadi tujuan dari program KB maka partisipasi terhadap program tidak saja ditujukan kepada perempuan. Rendahnya keikutsertaan laki-laki memberikan suatu gambaran bahwa dalam hal reproduksi dan pengendalian penduduk perempuan masih dianggap sebagai faktor dominan yang menyebabkan berbagai masalah. Padahal dalam hierarki keluarga seringkali keputusan untuk memiliki anak justru lebih dominan ditentukan oleh laki-laki. Orientasi pembangunan dan pengendalian penduduk melalui KB harus melibatkan subyek perempuan maupun laki-laki secara setara.

5. Derajat Kesehatan Penduduk

Salah satu hal utama yang menunjang terhadap pembangunan bidang kesehatan adalah adanya layanan kesehatan baik layanan yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Atas dasar persamaan hak untuk mendapatkan akses keseluruhan maka setiap orang tidak membedakan perempuan dan laki-laki harus mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan akses atas layanan kesehatan tersebut.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bahwa pada tahun 2017 ada sebanyak 25 unit puskesmas dan dibantu 69 unit Puskesmas Pembantu. Di samping itu, juga disediakan Puskesmas Keliling (Puskesmasling) sebanyak 70 unit yang bergerak secara *mobile* melayani sampai tingkat pedukuhan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Puskesmas dan Pustu tidak mengalami perubahan.



Jika diasumsikan setiap penduduk memiliki akses terhadap ketiga fasilitas tersebut, maka pada tahun 2017 setiap unit Puskesmas melayani sekitar 47.740 penduduk dan Pustu melayani sekitar 17.297 penduduk. Rasio penduduk terhadap fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan Pustu semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah daerah terus berupaya menambah jumlah kamar atau ruang rawat inap dan menambah tenaga penolong kesehatan, baik dokter, perawat maupun bidan.

Tabel 7: Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Pernah Berobat Jalan dalam 1 Bulan Terakhir menurut Fasilitas Kesehatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017 (persen)

Fasilitas Kesehatan (1)	Perempuan (2)	Laki-Laki (3)	Perempuan Laki-Laki (4)
1. RS Pemerintah	10,43	8,60	9,64
2. RS Swasta	19,68	17,43	18,71
3. Praktek dokter/bidan	33,04	40,83	36,40
4. Klinik/praktek dokter bersama	13,71	14,65	14,11
5. Puskesmas/Pustu	21,51	15,93	19,10
6. UKBM	0,09	1,30	0,61
7. Praktek pengobatan tradisional	1,34	0,84	1,13
8. Lainnya	0,21	0,42	0,30

Sumber: Susenas 2017

Berdasarkan kelompok gender, baik laki-laki maupun perempuan cenderung memilih praktek dokter/bidan sebagai tempat berobat. Secara persentase dari perempuan yang berobat jalan ada sekitar 33,04 persen pergi ke praktek dokter/bidan, sedangkan laki-laki yang mencapai sekitar 40,83 persen. Puskesmas menjadi pilihan kedua perempuan sekitar 21,51 persen, sedangkan rumah sakit swasta menjadi pilihan kedua laki-laki 17,43 persen. Sedangkan perempuan yang menggunakan fasilitas rumah sakit baik pemerintah, rumah sakit swasta dan Puskesmas/Pustu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persentase dari perempuan yang berobat jalan di rumah sakit swasta sekitar 19,68 persen, sedangkan laki-



laki sekitar 17,43 persen. Selanjutnya yang berobat jalan di rumah sakit pemerintah dan Puskesmas/Pustu masing-masing secara berurutan 10,43 persen dan 21,51 persen bagi perempuan, sedangkan 8,60 persen dan 15,93 persen bagi laki-laki. Bisa dikatakan bahwa berdasarkan data tersebut akses terhadap layanan kesehatan yang dilakukan baik di rumah sakit maupun pusat layanan kesehatan masyarakat sudah merata baik pada kaum laki-laki maupun perempuan. Yang harus diperhatikan berikutnya adalah terkait dengan kualitas layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan terutama pada unit layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat.

C. Analisis Isu Gender dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman

Pendidikan menjadi salah satu parameter utama dalam melihat kemajuan suatu bangsa. Dengan Pendidikan maka dapat diciptakan suatu tatanan masyarakat yang cerdas, terampil, berwawasan luas serta memiliki karakter yang kuat. Hal tersebut telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Dengan tingkat pendidikan yang baik dan berkualitas, orang akan memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

Upaya peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika perempuan memiliki akses yang baik pada pendidikan dan sumber informasi lain. Dengan tingkat pendidikan yang baik, orang memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Melalui pendidikan, perempuan



akan memiliki jalan untuk ikut serta dalam hidup bermasyarakat dengan baik.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Program pemerintah dengan mencanangkan wajib belajar Sembilan tahun dimaksudkan sebagai upaya agar penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah dengan harapan agar buta huruf di usia sekolah dapat ditekan. Ukuran untuk mengetahui anak-anak pada umur sekolah masih tetap sekolah atau tidak sekolah lagi dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya murid kelompok usia jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang

Tabel 8: Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017 (persen)

Kelompok Usia Sekolah (tahun)	Terpenuhi	Taki-Taki	Terpenuhi+ Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12	100,00	100,00	100,00
13 - 15	99,84	100,00	99,93
16 - 18	90,77	87,56	86,38
19 - 24	62,68	65,15	63,95

Sumber: Susenas 2017

diikuti. Batasan umur yang diterapkan dalam perhitungan ini adalah sesuai yang disarankan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu untuk usia Sekolah Dasar 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun SMA 16-18 tahun dan perguruan tinggi 19-24 tahun.

Angka Partisipasi Sekolah untuk Kabupaten Sleman kelompok usia SD (7-12 tahun) pada tahun 2017 telah mencapai 100 persen. Selanjutnya pada kelompok usia 13-15 tahun nilai APSnya hampir mencapai 100 persen, yaitu sekitar 99,93 persen. Artinya penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13 - 15 tahun hampir semuanya terdaftar dan aktif bersekolah, baik di jenjang Pendidikan formal maupun nonformal.

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa wajib belajar sembilan tahun yang menjadi program pemerintah tampaknya mulai menunjukkan keberhasilan. Sedangkan nilai APS pada kelompok usia 19-24 tahun sebesar 63,95 persen. Angka ini mengandung



pengertian bahwa lebih dari setengah dari seluruh penduduk usia 19-24 tahun berstatus bersekolah dan sisanya belum/tidak bersekolah lagi.

Jika dilihat berdasarkan laki-laki dan perempuan maka APS perempuan usia 7-12 tahun telah mencapai 100 persen, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun, baru APS laki-laki yang telah mencapai 100 persen. APS perempuan pada kelompok usia 16-18 tahun justru lebih tinggi dibandingkan laki-laki. APS perempuan tahun 2017 mencapai 90,72 tahun, sedangkan APS laki-laki lebih rendah, yaitu mencapai 82,55 persen. Pada kelompok umur 19-24 tahun, APS laki-laki lebih tinggi dibanding APS perempuan, yaitu sebesar 65,15 persen untuk laki-laki dan 62,68 persen untuk perempuan. Secara umum APS antara laki-laki dan perempuan tidak terpaut cukup jauh. Artinya dalam hal partisipasi sekolah tidak ada ketimpangan gender yang signifikan. Sebagai salah satu kota pendidikan Sleman sudah selayaknya memberikan akses seluas-luasnya baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menikmati pendidikan. Tentu capaian yang telah ada perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga tingkat keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan dapat tercapai.

2. Angka Putus Sekolah

Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan juga bisa dilihat dari banyak sedikitnya anak yang putus sekolah. Seorang anak dikatakan putus sekolah jika anak usia sekolah yang sudah mengenyam suatu jenjang sekolah tetapi tidak berhasil menamatkan jenjang sekolah tersebut.



Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sleman pada tahun 2017 terdapat 41 anak putus sekolah. Anak putus sekolah terbanyak terjadi pada jenjang SMK yang mencapai 18 anak. Jumlah ini berkurang dibanding tahun 2016 yang mencapai 28 anak. Pada tahun 2017 anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD bertambah menjadi 12 anak. Jumlah ini justru naik dibanding tahun lalu sebanyak 8 anak. Sedangkan pada jenjang SMP, anak putus sekolah berjumlah 9 anak. APS paling sedikit pada jenjang SMA yaitu hanya sebanyak 2 anak.

Tabel 9: Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017 (anak)

Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Perempuan+ Laki Laki
(1)	(2)	(3)	(4)
1. SD	5	7	12
2. SMP	9	0	9
2. SMA	1	1	2
3. SMK	2	16	18
Jumlah	17	24	41

Sumber: Dinas Olahraga Sleman

Berdasarkan jenis kelamin jumlah anak putus sekolah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu mencapai 59,54 persen dari total anak yang putus sekolah (24 anak). Jika dilihat per jenjang pendidikan, terlihat bahwa anak putus sekolah terbanyak umumnya berjenis kelamin laki-laki, kecuali pada jenjang SMP justru lebih banyak perempuan.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah anak putus sekolah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu mencapai 59,54 persen dari total anak yang putus sekolah (24 anak). Jika dilihat per jenjang pendidikan, terlihat bahwa anak putus sekolah terbanyak umumnya berjenis kelamin laki-laki, kecuali pada jenjang SMP justru lebih banyak perempuan.

3. Harapan Lama Sekolah

Proses pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk berperan dan berinteraksi dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Salah satunya dapat diukur dengan indikator harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah mengasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.



Pada periode tahun 2013 - 2017, angka harapan lama sekolah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 angka harapan lama sekolah penduduk Sleman rata-rata mencapai 15,52 tahun dan pada tahun 2017 sudah meningkat menjadi 16,48 tahun. Peningkatan ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika diamati lebih seksama angka harapan lama sekolah

Tabel 10: Angka Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2013 -2017 (tahun)

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Perempuan+ Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	15,23	15,75	15,52
2014	15,44	15,96	15,64
2015	15,50	16,04	15,77
2016	15,51	16,40	16,08
2017	15,97	16,59	16,48

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

perempuan selalu sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki pada setiap tahunnya. Hal ini menjadi problem, karena perempuan yang memiliki harapan sekolah rendah ada kecenderungan menikah di usia sekolah. hal tersebut dapat mengakibatkan dampak lanjutan yang lebih buruk bagi anak perempuan. Kesenjangan dalam hal harapan sekolah di Kabupaten Sleman perlu mendapatkan perhatian agar baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat mewakili tingkat ketrampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Indikator ini memberikan informasi sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Semakin tinggi mereka mengenyam pendidikan, diharapkan memiliki ketrampilan yang lebih baik.

Walaupun jika dilihat pada tabel rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman sudah lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di D.I. Yogyakarta, tetapi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih tetap ada. Hal ini terlihat dari rata-rata lama



sekolah laki-laki yang sudah mencapai 11,30 tahun, tetapi perempuan baru mencapai 10,14 tahun. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak terlihat signifikan.

Tabel 11: Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017 (tahun)

Kabupaten/Kota	Perempuan	Laki-laki	Perempuan / Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kulonprogo	8,77	9,17	8,61
02. Bantul	8,79	9,69	9,20
03. Gunungkidul	6,33	7,74	6,99
04. Sleman	10,14	11,30	10,66
71. Yogyakarta	10,91	11,78	11,43
34. D.I. Yogyakarta	8,73	9,74	9,19

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

5. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat kualitas penduduk, karena pada umumnya kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh jenjang pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin luas peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pendataan Susenas 2017, pendidikan tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditamatkan paling banyak tamatan SMA/MA/ sederajat, baik laki-laki maupun perempuan. Penduduk berumur 15 tahun ke atas ada sekitar 25,03 persen penduduk tamatan SMA/MA/ sederajat diantara laki-laki dan 25,32 persen bagi perempuan. Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi maka setiap orang harus diberikan kesempatan dan akses yang terbuka. Namun demikian dalam hal kesempatan bersekolah, masih terdapat ketimpangan jika dilihat berdasarkan kesempatan yang diperoleh laki-laki maupun perempuan.

Tabel 12: Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017 (persen)

Pendidikan yang Ditamatkan	Perempuan	Laki - laki	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tdk/Min pernah bersekolah	69,99	30,01	100,00
2. Tidak tamat SD	48,65	51,35	100,00
3. SD/MI	52,80	47,20	100,00
4. SMP/MTs/ sederajat	50,17	49,83	100,00
5. SMU/MA/ sederajat	50,13	49,87	100,00
6. SM Kejuruan	38,09	61,91	100,00
7. Diploma I / II	57,09	42,91	100,00
8. Diploma III / Sarjana	51,33	48,67	100,00
9. D IV / S1	51,64	48,36	100,00
10. S2 / S3	31,00	69,00	100,00

Sumber: Susenas 2017

Secara umum tidak ada perbedaan tingkat pendidikan yang cukup signifikan antara perempuan dengan laki-laki, kecuali pada jenjang di bawah SD dan SMK. Selain pendidikan di bawah SD dan



SMK, proporsi perempuan dan laki-laki cukup berimbang (49-50 persen). Sedangkan proporsi perempuan yang tidak/belum pernah bersekolah (69,99 persen) maupun yang tidak tamat SD (30,01 persen) jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini dimungkinkan sebagai akibat warisan ketimpangan masa lalu, dimana ketimpangan terjadi pada penduduk usia tua.

Sebaliknya pada jenjang SMK, proporsi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi ini tentunya karena SMK umumnya mengedepankan *hardskill* dari pada *softskill* dan mencetak generasi siap kerja. Bagi kebanyakan perempuan, *softskill* lebih mereka utamakan dan motivasi perempuan untuk langsung kerja tidak sebesar laki-laki. Laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi keluarga memotivasi mereka untuk bisa langsung kerja secepatnya.

D. Analisis Isu Gender dalam Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Sleman

Salah satu ukuran output dari suatu kegiatan ekonomi di suatu wilayah adalah pendapatan regional. Dari pendapatan regional tersebut maka akan diperoleh gambaran perekonomian pada tahun tertentu dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Selain itu dari pendapatan regional juga dapat dilihat kontribusi masing-masing terhadap pendapatan regional tersebut. Sedangkan input untuk menghasilkan suatu output membutuhkan beberapa kapital. Salah satu kapital yang mempunyai peranan dalam kegiatan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketenagakerjaan menjadi aspek yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran pembangunan Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, upaya pembangunan banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.



Masalah ketenagakerjaan perempuan dalam kerangka pembangunan berperspektif gender merupakan isu yang paling kerap dibicarakan. Ketimpangan atau ketidakadilan gender lebih banyak tercermin di dunia kerja yang semestinya tidak perlu terjadi. Isu masih adanya diskriminasi seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah langkanya promosi jabatan bagi tenaga kerja perempuan, upah yang relatif rendah dan kondisi-kondisi kodrati perempuan seperti haid, melahirkan dan menyusui. Sementara itu, isu kualitas tenaga kerja perempuan biasanya dihubungkan dengan masalah masih rendahnya pendidikan mereka, sehingga menjadi sasaran bagi perusahaan yang berorientasi buruh murah.

1. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS mengacu pada konsep dan definisi yang digunakan adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh ILO. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang dimaksudkan dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini selanjutnya dikategorikan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara yang tidak termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan lainnya, yaitu sekitar 67,70 persen dan diikuti kegiatan mengurus rumah tangga sekitar 15,41 persen. Namun jika diamati, partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Pada tahun 2017, perempuan yang termasuk angkatan kerja sekitar 61,57 persen, sedangkan laki-laki sekitar 78,72 persen dan sebaliknya perempuan yang termasuk kategori bukan angkatan kerja lebih banyak daripada laki-laki.

Tabel 13: Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama yang Dilakukan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017

Kegiatan Utama (1)	Perempuan		Laki-laki		Perempuan+ Laki-laki	
	Banyaknya (2)	% (3)	Banyaknya (4)	% (5)	Banyaknya (6)	% (7)
Angkatan kerja	268.412	61,57	370.899	78,72	639.311	70,17
Bekerja	278.669	59,49	357.464	75,67	636.132	67,70
Pengangguran	9.744	2,08	13.429	2,85	23.173	2,49
Bukan Angkatan Kerja	160.001	38,43	100.260	21,28	260.261	29,83
Sekolah	45.896	9,80	58.903	12,50	104.800	11,17
Mengurus Kats	123.083	26,28	21.699	4,60	144.782	15,41
Lainnya	11.022	2,35	19.658	4,18	30.680	3,27
Penduduk Usia Kerja	408.413	100,00	471.161	100,00	879.574	100,00

Sumber : Sektrens 2017

Jika dilihat menurut kegiatan utama, cukup terlihat jelas adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang terkait kegiatan ekonomi (bekerja) dan peningkatan kemampuan (sekolah dan lainnya), laki-laki lebih banyak yang terlibat dibandingkan perempuan. Demikian pula perempuan yang menganggur juga lebih sedikit.

Sedikitnya perempuan yang menganggur dikarenakan mereka lebih memilih untuk berperan mengurus rumah tangga. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan lebih banyak terlibat dalam mengurus rumah tangga (domestic) dan bukan dalam pekerjaan publik, yaitu mencapai 26,28 persen, sedangkan laki-laki hanya sekitar 4,60 persen. Kenyataan ini dapat dijelaskan karena laki-laki sebagai penanggung jawab utama rumah tangga

Tabel 14: Penganggur Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sleman, 2017

Kegiatan Utama (1)	Perempuan		Laki-laki		Perempuan+ Laki-laki	
	Banyaknya (2)	% (3)	Banyaknya (4)	% (5)	Banyaknya (6)	% (7)
1. SMP ke bawah	2.193	22,51	2.530	18,87	4.723	30,40
2. SMA/MA/SMK	7.706	88,00	7.386	56,00	15.092	47,89
3. Akademik/PT	3.645	39,46	3.509	26,12	7.154	31,74
Jumlah	9.744	100,00	13.429	100,00	23.173	100,00

Sumber : Sektrens 2017



cenderung berupaya bekerja seoptimal mungkin, sedangkan bagi sebagian perempuan, bekerja dianggapnya sebagai pekerjaan sambilan untuk membantu ekonomi rumah tangga dan mengurus rumah tangga menjadi pilihan mereka.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pengangguran di Kabupaten Sleman didominasi mereka yang lulus SMA sederajat baik untuk perempuan maupun laki-laki. Sedangkan pada kelompok penduduk lulusan SMP ke bawah dan SMA ternyata jumlah penganggur laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada jenjang lulusan Akademi/PT jumlah penganggur perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki, kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan perempuan lulusan Akademi/PT cenderung lebih memilih tidak bekerja untuk mengurus rumah tangganya.

Tingginya partisipasi laki-laki dibandingkan perempuan pada kelompok angkatan kerja yang bekerja atau tingginya perempuan dibandingkan laki-laki pada kelompok bukan angkatan kerja mengakibatkan kesenjangan yang cukup signifikan dalam partisipasi angkatan kerja antar jenis kelamin. Kondisi secara langsung juga berdampak pada ketimpangan pendapatan yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender ini menunjukkan indikasi adanya ketidaksetaraan gender yang *inheren*, yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

2. Lapangan, Status Pekerjaan dan Jam Kerja

a. Lapangan Kerja

Klasifikasi pekerjaan menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Semakin besar proporsi pekerja di sektor primer (pertanian) maka semakin tinggi '*under utilities*' pekerja, karena sektor pertanian di Indonesia masih merupakan sector dengan produktivitas terendah dan dikerjakan secara tradisional.



Tabel 15: Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2015 dan 2017

Lapangan Usaha (1)	Perempuan		Laki-laki		Perempuan+ Laki-Laki	
	Danyakny	%	Danyakny	%	Danyakny	%
Tahun 2015						
1. Pertanian	27.174	11,72	51.090	15,73	78.264	13,80
2. Industri Pengolahan	33.540	14,47	42.566	12,69	76.106	13,42
3. Perdagangan & Hotel	70.798	33,13	74.473	22,20	145.271	26,67
4. Jasa-jasa	85.256	36,78	97.649	29,11	182.905	33,24
5. Lainnya	9.016	3,89	69.724	20,78	78.740	14,68
Jumlah	231.764	100,00	325.502	100,00	557.266	100,00
Tahun 2017						
1. Pertanian	51.012	18,51	50.416	14,10	101.428	15,94
2. Industri Pengolahan	44.115	15,83	46.857	13,11	90.972	14,30
3. Perdagangan & Hotel	103.087	36,28	84.262	23,57	187.349	29,14
4. Jasa-jasa	75.541	27,11	75.094	21,01	150.635	23,68
5. Lainnya	6.013	2,18	100.835	28,71	107.848	16,42
Jumlah	276.668	100,00	357.464	100,00	634.132	100,00

Sumber: Sakernas 2015 dan 2017

Dari data tersebut terlihat bahwa Sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan & hotel merupakan sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja. Kedua sektor ini terus bersaing dalam menyerap tenaga kerja, bahkan

masing-masing mampu menyerap lebih dari seperempatnya. Pada tahun 2015, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa dilanjut sektor perdagangan & hotel. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi sebaliknya. Sektor perdagangan & hotel tahun 2017 lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor jasa-jasa.

Dilihat menurut jenis kelamin, sektor perdagangan dan hotel lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kegiatan perempuan di sektor perdagangan dan hotel naik, dari tahun 2015 ke tahun 2017 yaitu dari sekitar 33,13 persen menjadi 36,28 persen. Demikian pula kegiatan di sektor jasa-jasa. Tahun 2015 partisipasi perempuan sekitar 36,78 persen, sedangkan tahun 2017 sekitar 27,11 persen. Pada sektor pertanian dan industri pengolahan justru mengalami kecenderungan naik, masing-masing dari 11,72 persen dan 14,47 persen di tahun 2015 menjadi 18,31 persen dan 15,83 persen pada tahun 2017. Secara umum kesempatan kerja pada bidang-bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud terlihat lebih merata dan tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan.



b. Status Pekerjaan

Untuk melihat gambaran pekerjaan maka yang perlu dilihat berikutnya adalah mengenai status pekerjaan. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama diklasifikasikan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu oleh pekerja keluarga/buruh tidak tetap, berusaha dibantu oleh buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Berkaitan dengan status pekerjaan dapat dilihat data sebagai berikut:

Tabel 16: Perbandingan Status Pekerjaan Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Sleman

Status Pekerjaan Utama (1)	Perempuan		Laki-laki		Perempuan+ Laki-Laki	
	Jumlahnya (2)	% (3)	Jumlahnya (4)	% (5)	Jumlahnya (6)	% (7)
1. Berusaha sendiri	39.907	14,14	32.835	9,19	72.742	11,36
2. Berusaha dibantu pekerja tetap/tidak dibayar	46.295	16,61	13.169	3,81	59.464	9,28
3. Berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar	5.310	1,91	17.585	4,91	22.895	3,60
4. Buruh/karyawan/ pekerja tetap	126.021	45,22	178.062	49,81	304.083	47,60
5. Pekerja Bebas Pertanian	9.004	3,22	7.260	1,47	16.264	2,37
6. Pekerja Bebas Non Pertanian	3.199	1,15	13.190	3,17	16.389	2,31
7. Pekerja tidak dibayar	48.632	17,45	16.590	4,64	65.222	10,25
Jumlah	278.668	100,00	337.464	100,00	616.132	100,00

Sumber : Sekernas 2017

Dari data tersebut terlihat bahwa status pekerjaan berdasarkan perbedaan jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai jauh lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu mencapai 178.062 orang (49,81 persen) laki-laki dan 126.021 orang (45,22

persen) perempuan. Demikian pula, penduduk laki-laki yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/dibayar persentasenya juga cukup jauh dibandingkan dengan mereka yang bekerja dengan status pekerja bebas pertanian, yaitu secara berurutan masing-masing sekitar 17,81 persen dan 1,47 persen.

Status berusaha dibantu buruh tidak tetap/dibayar tersebut mendominasi status pekerjaan laki-laki setelah status sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Sementara bagi kelompok perempuan selain sebagai buruh/karyawan/ pegawai dan berusaha sendiri, banyak juga



yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (17,45 persen). Persentase perempuan yang bekerja dengan status berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja dibayar naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 16,61 persen. Sementara itu persentase perempuan yang bekerja dengan status berusaha sendiri tercatat mencapai 14,14 persen dari seluruh penduduk perempuan yang bekerja.

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan terdapat perbedaan yang cukup mencolok pada status pekerjaan pekerja bebas non pertanian dan pekerja tidak dibayar. Persentase penduduk laki-laki yang status pekerjaannya sebagai pekerja bebas di non pertanian sekitar 12,17 persen sedangkan perempuan hanya 1,15 persen. Dengan data ini maka terlihat akses atau kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih luas antara laki-laki dan perempuan masih memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini bisa karena faktor struktur ekonomi yang ada serta juga faktor sosio kultural masyarakat yang belum memberi kesempatan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki.

Selain itu terdapat perbedaan mencolok juga dalam hal berusaha dibantu oleh pekerja tetap/dibayar. Untuk laki-laki sekitar 4,91 persen dan perempuan hanya 1,91 persen. Hal hal tersebut memberikan gambaran bahwa pekerjaan yang banyak digeluti oleh perempuan adalah wirausaha kelas menengah dan kecil. Dengan peran tersebut maka kemampuan produktivitas dan pendapatan juga akan mengalami perbedaan. Dari sisi ini maka perlu ditingkatkan upaya untuk mengembangkan usaha yang dilakukan terhadap wirausaha perempuan sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas usahanya.

c. Jam Kerja

Jam kerja berhubungan erat dengan produktivitas kerja. Asumsinya adalah semakin banyak jam kerja maka semakin



produktif. Namun jumlah jam kerja selama seminggu ini tidak sepenuhnya dapat memberikan gambaran tingkat produktivitas, terutama bagi mereka yang memang menghendaki jam kerja rendah. Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh (*full employed*) atau tidak penuh (*under*) ditunjukkan oleh jumlah jam kerja dalam seminggu. Dikatakan sebagai pekerja penuh bila jam kerja seseorang telah mencapai 35 jam atau lebih dalam seminggu (jam kerja normal).

Jika dihitung berdasarkan ukuran jam kerja normal maka perempuan memiliki jam kerja yang lebih rendah dari pada laki-laki. Hal ini tercermin dari lebih rendahnya proporsi perempuan yang bekerja di atas jam kerja normal. Rendahnya jumlah jam kerja perempuan dapat disebabkan karena adanya peran ganda perempuan sehingga perempuan lebih memilih bekerja sambilan atau bekerja paruh waktu. Selain itu perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang jam kerjanya bisa jadi lebih dari 12 jam sehari tidak dihitung sebagai jam kerja sebagaimana laki-laki dan berpengaruh terhadap angka normative dari produktivitas.

Di Kabupaten Sleman pada tahun 2017, persentase penduduk perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal sebesar 36,83 persen. Persentase kelompok perempuan lebih tinggi

dibandingkan laki-laki yang tercatat sebesar 18,71 persen. Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal

Tabel 17: Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017

Jam Kerja Seminggu	Perempuan		Laki-laki		Perempuan+ laki-Laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 35	102 626	36,83	66 883	18,71	169 509	26,65
≥ 35	176 042	63,17	290 531	81,29	466 623	73,35
Jumlah	278 668	100,00	357 454	100,00	636 132	100,00

Sumber: Sakernas 2015



kecenderungannya bekerja di pertanian, membantu kepala rumahtangga bekerja di sawah.

E. Pembangunan Gender di Kabupaten Sleman

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tuntutan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam segala aspek menjadi tidak terbendung seiring dengan perkembangan dan dinamika pembangunan. Untuk merespon hal tersebut maka diperlukan

upaya arifmasi terhadap hak-hak perempuan sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan laki-laki.

Merujuk pada UNDP bahwa untuk mengevaluasi sejauh mana gambaran ketidaksetaraan gender diperlukan sebuah indikator komposit yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur rata-rata geometric pencapaian dalam kemampuan dasar, sama seperti dalam IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) tetapi dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender.

Sebagai indikator komposit, IPG memberikan gambaran secara agregat, sedangkan implementasi hasil penghitungan IPG dalam program pembangunan membutuhkan kajian lebih jauh pada indikator yang berkait dengan komponen penyusun IPG. Komponen pembentuk IPG yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berdasarkan kelompok gender.

Grafik 7: Perkembangan IPG Kabupaten Sleman, 2013 – 2017



Sumber : BPS, 2012-2016 (2017 data diolah)



Tabel 18: Capaian IPM dan IPG di Kabupaten Sleman, 2014 – 2017

Tahun	Nilai IPM	Nilai IPG
(1)	(2)	(3)
2014	80,73	96,09
2015	81,20	96,08
2016	82,15	95,51
2017	82,85	95,62

Sumber : Badan Pusat Statistik

IPG Kabupaten Sleman pada periode 2013-2014 mengalami peningkatan. Dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Tiga tahun berikutnya angka IPG mengalami fluktuasi. Tahun 2015 dan 2016 angka IPG mengalami penurunan dan tahun berikutnya kembali naik. IPG Sleman tahun 2016 mencapai 95,51 dan tahun 2017 naik menjadi 95,62. Kenaikan ini disebabkan karena pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki, walaupun kualitas keduanya sama-sama tumbuh. Artinya bahwa dalam satu tahun terakhir pembangunan yang berwawasan gender mulai menunjukkan gejala yang lebih merata. Apabila dicermati, naiknya nilai IPG pada tahun 2017 cukup kecil, yaitu 0,11. Hal tersebut mengindikasikan perlunya perhatian yang cukup dari pemerintah, terutama dalam redistribusi peran dengan memperhatikan pembangunan yang berbasis gender.



Selain memperhatikan perubahan angka indeksnya, mengingat IPG merupakan indeks komposit maka perlu dikaji juga beberapa

Tabel 18: Indikator IPG Kabupaten Sleman, 2014 – 2017

No.	Uraian	Nilai			
		2014*)	2015*)	2016*)	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komponen IPG					
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	76,39	76,49	76,50	76,53
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,44	15,50	15,51	15,97
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,76	9,78	10,13	10,14
4.	Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (000 Rp)	13 979	14 219	14 355	14 515
Indeks IPG					
1.	Kesehatan	0,83	0,83	0,83	0,83
2.	Pendidikan	0,75	0,76	0,77	0,78
3.	Pendapatan	0,80	0,81	0,81	0,82
IPM Perempuan		79,51	79,81	80,33	80,91
IPG		96,09	96,08	95,51	95,62

Sumber : BPS, 2014-2016 (2017 diolah)
Catatan: *) Angka Revisi

perubahan pada komponen pembentuknya. Dalam kurun waktu 2014-2017 komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terus mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap indeks IPG yang dihasilkan. Pada tahun

2017 indeks kesehatan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,83. Sedangkan indeks pendidikan dan pendapatan masing masing naik sebesar 0,1 (indeks pendidikan menjadi 0,78 dan indeks pendapatan menjadi 0,82). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di dunia kerja masih perlu terus ditingkatkan.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Selanjutnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi. Sedangkan sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan.



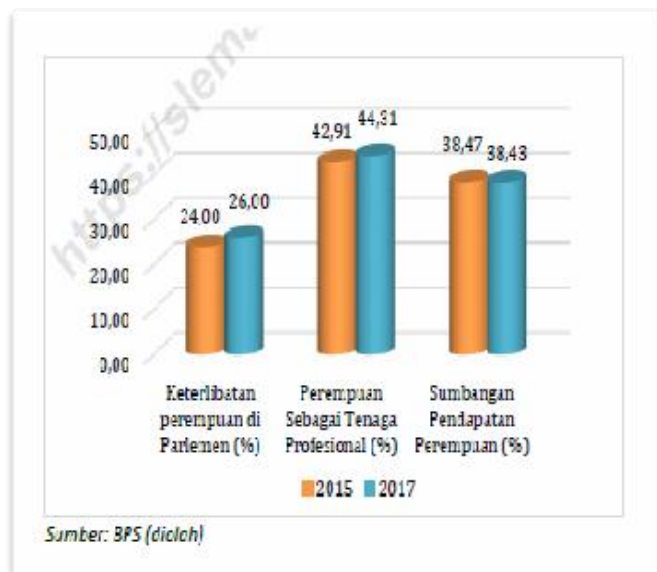
Dilihat dari komponen pembentuknya,

peningkatan IDG Kabupaten Sleman pada tahun 2017 disebabkan karena meningkatnya peranan perempuan di parlemen dan peranan perempuan sebagai tenaga profesional. Sedangkan sumbangan pendapatan perempuan justru mengalami sedikit

penurunan. Tahun 2017 keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi se-D.I Yogyakarta, yaitu sebesar 26 persen. Demikian pula perannya sebagai tenaga profesional juga mengalami peningkatan, yaitu dari 42,91 persen pada tahun 2015 turun menjadi 44,31 persen pada tahun 2017. Sedangkan andil pendapatan perempuan turun sekitar 0,04 poin.

Meskipun peran perempuan dalam parlemen di Kabupaten Sleman terjadi peningkatan namun prosesentasenya masih dibawah 30% sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Hal ini mengindikasikan masih terjadi ketimpangan dalam bidang politik dan penentuan kebijakan di parlemen antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara peran dan partisipasi perempuan bisa dikatakan terjadi peningkatan khususnya pada parlemen dan professional namun perbandingan pendapatan dengan laki-laki masih terdapat ketimpangan 10-12 persen. Dengan kondisi ini maka upaya pemberdayaan perlu dilakukan sehingga tidak saja menambah kesempatan peran-peran strategis bagi perempuan secara kuantitatif tetapi juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas dari pemberdayaan perempuan.

Grafik 8: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/Kota Persentase Komponen IDG Kabupaten Sleman Tahun 2015 dan 2017



3. Partisipasi Perempuan

Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender. Pembangunan yang dilakukan semestinya harus berwawasan gender, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang pelayanan publik. Kesetaraan gender di bidang ekonomi dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam menduduki jabatan suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan kesetaraan gender dalam pelayanan publik dengan melihat peran dalam bidang pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

a. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Ekonomi

Partisipasi gender dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari kontribusi perempuan maupun laki-laki dalam kegiatan ekonomi. Peran tersebut dapat dilihat dari indikator jabatan/jenis dalam pekerjaan utama. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat pemerataan tingkat keahlian atau keterampilan dari pekerjaan yang dilakukan.

Tabel 20: Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017

Jenis dalam Pekerjaan Utama	Perempuan		Laki-laki		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ahli dan Tenaga Profesional	26 583	47,41	29 483	52,59	56 066	100,00
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	2 013	16,31	10 327	83,69	12 340	100,00
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha	25 820	47,46	28 588	52,54	54 408	100,00
4. Tenaga Usaha Penjualan	64 166	56,17	50 073	43,83	114 239	100,00
5. Tenaga Usaha Jasa	39 317	57,24	29 369	42,76	68 686	100,00
6. Tenaga Usaha Pertanian	50 920	50,20	50 505	49,80	101 425	100,00
7. Tenaga Produksi dan Pekerja Kasar Lainnya	68 099	32,32	142 612	67,68	210 711	100,00
8. Lainnya	1 750	9,59	16 507	90,41	18 257	100,00
Jumlah	278 668	43,81	357 464	56,19	636 132	100,00

Sumber: Sakernas 2017



Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa secara umum jumlah perempuan yang bekerja lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan hanya berkontribusi 43,81 persen, sedangkan laki-laki mencapai 56,19 persen. Jika ditelusuri lebih jauh menurut jabatan/jenis pekerjaan utama ternyata distribusi gendernya belum merata. Perempuan lebih mendominasi pada jabatan tenaga usaha jasa, tenaga usaha penjualan, dan tenaga usaha pertanian. Pada jabatan tersebut peran perempuan lebih dari separo, secara berurutan masing-masing sebesar 57,24 persen, 56,17 persen dan 50,20 persen.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa pada jabatan-jabatan tersebut dibutuhkan ketelitian dan ketekunan yang pada umumnya karakter tersebut dimiliki perempuan. Sedangkan dalam jabatan tenaga kepemimpinan & ketatalaksanaan, pejabat pelaksana & tenaga tata usaha, tenaga usaha pertanian, tenaga produksi & tenaga kasar lain, dan jabatan lainnya lebih didominasi oleh laki-laki. Tenaga pertanian dan produksi membutuhkan kemampuan fisik sehingga wajar jika didominasi laki-laki dibandingkan perempuan. Namun demikian ada kondisi yang cukup memprihatinkan dimana pada jabatan kepemimpinan & ketatalaksanaan sangat didominasi laki-laki (83,69 persen), sedangkan kontribusi perempuan cukup sedikit, yaitu hanya mencapai 16,31 persen. Hal ini menandakan bahwa jabatan-jabatan dalam pekerjaan masih terjadi ketimpangan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Kesempatan menjadi pimpinan harus dibuka luas dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tidak sedikit contoh pimpinan perusahaan/CEO perempuan yang selain memiliki ketelitian juga memiliki integritas dan kinerja diatas laki-laki. Pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas perempuan sehingga dapat setara dengan laki-laki dalam manajerial perlu dilakukan dengan seksama.



b. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Legislatif

Sejak tahun 2014 mensyaratkan partai peserta pemilu harus memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Tujuan terpenuhinya 30 persen perempuan yang menduduki kursi legislatif adalah agar hak-hak perempuan sebagai warga negara diperhatikan terutama hak perempuan dalam bidang politik, sehingga pembangunan-pembangunan yang berbasis gender lebih diperhatikan.

Keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif di beberapa daerah kenyataannya masih jauh dari harapan. Begitu pula di Kabupaten Sleman, jumlah anggota DPRD saat ini masih didominasi oleh laki-laki. Pada periode 2009-2014, perempuan

Tabel 21: Banyaknya Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, periode 2009-2014 dan 2014-2019

Jenis Kelamin	Periode 2009-2014		Periode 2014-2019	
	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	9	18,00	12	23,53
Laki-laki	41	82,00	39	76,47
Jumlah	50	100,00	51	100,00

Sumber : Setwan Kabupaten Sleman

yang duduk di kursi legislatif baru mencapai 18 persen. Walaupun demikian pada periode 2014-2019, porsi perempuan yang menjadi anggota DPRD meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sudah mencapai 23,53 persen. Rendahnya anggota legislatif perempuan dikarenakan masih kurangnya kemampuan dalam menyampaikan pendapat, kurangnya kepercayaan diri, minat dan kesempatan perempuan di bidang politik. Oleh sebab itu untuk mengatasi ketimpangan kesempatan menjadi legislator maka diperlukan upaya pemberdayaan terutama bagi perempuan

c. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Eksekutif

Pembangunan yang berwawasan gender di pemerintahan, selain keikutsertaan peran perempuan di lembaga legislatif, juga di lembaga eksekutif. Peran perempuan di lembaga eksekutif



terlihat dari perannya sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN). Perempuan sebagai warga negara semestinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama menjadi ASN.

Berdasarkan catatan data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman bahwa pada tahun 2016 persentase perempuan yang menjadi ASN pada Pemerintah Kabupaten Sleman lebih besar

Tabel 22: Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sleman menurut Jenis Kelamin, 2016-2017

Jenis Kelamin	2016		2017	
	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	6555	58,18	6659	60,02
Laki-laki	4711	41,82	3769	39,98
Jumlah	11266	100,00	9428	100,00

Sumber: BKPP Kabupaten Sleman

dibanding laki-laki yaitu 58,18 persen berbanding 41,82 persen. Sama halnya pada tahun 2017, persentase ASN perempuan di Pemerintah Kabupaten Sleman meningkat menjadi 60,02 persen dan sebaliknya persentase laki-lakinya menurun menjadi 39,98 persen.

Secara kuantitas jumlah PNS perempuan memang lebih banyak dibanding laki-laki. Akan tetapi apabila diperhatikan lebih jauh menurut jabatan structural ternyata perempuan yang duduk dalam pimpinan pemerintahan (terutama jabatan administrator ke atas) masih sangat timpang jumlahnya dibandingkan laki-laki. Secara umum pada tahun 2017 jumlah pejabat structural perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pejabat laki-laki. Dari total 795 jabatan structural yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Sleman, hanya 40,25 persen yang dipegang perempuan dan sisanya laki-laki.



Kondisi yang sama juga terjadi pada semua jabatan struktural, dimana jabatan yang diduduki perempuan tidak ada yang melebihi 50 persen. Dari pejabat pengawas ada sebanyak 591 jabatan, 42,13 persen diantaranya dipegang oleh perempuan. Pada jenjang jabatan administrator bukan camat, perempuan yang menduduki jabatan ini ini sekitar 37 persen, yaitu tepatnya hanya mencapai 37,75 persen dibandingkan laki-laki. Bahkan pada jabatan administrator camat terlihat sangat timpang sekali. Dari

Tabel 23: Jumlah Pejabat Struktural menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2017

Jabatan Struktural	Perempuan		Laki-Laki		Perempuan+ Laki-Laki	
	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pimpinan Tinggi Pratama	11	30,56	25	69,44	36	100,00
Administrator non Camat	57	37,75	94	62,25	151	100,00
Administrator Camat	3	17,65	14	82,35	17	100,00
Pengawas	249	42,13	342	57,87	591	100,00
Jumlah	320	40,25	475	59,75	795	100,00

Sumber: BKEP Kabupaten Sleman

17 jabatan camat yang tersedia, 82,35 persen dipegang laki-laki dan sisanya hanya sebesar 17,65 persen perempuan.

Belum meratanya distribusi jabatan antara laki-laki dan perempuan juga terjadi pada jenjang jabatan pimpinan tinggi pratama. Perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama hanya ada 11 orang (30,56 persen) dari total 36 jabatan yang tersedia.

d. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Yudikatif

Peran perempuan di bidang pemerintahan, selain di lembaga legislative dan eksekutif juga terlihat di lembaga penegak hukum (yudikatif). Walaupun proporsinya masih relatif sedikit, perempuan juga ikut duduk dalam lembaga penegak hukum di daerah. Peran perempuan di lembaga hukum duduk sebagai anggota polisi, hakim maupun jaksa.



Seperti pada jabatan di bidang legislatif dan eksekutif, peran perempuan di lembaga penegakan hukum juga masih relatif timpang. Jumlah anggota polisi wanita di Kabupaten Sleman masih sangat sedikit, yaitu masih berkisar 7 persen. Polisi wanita pada tahun 2017 jauh lebih kecil dibanding polisi laki-laki, 7,25 persen berbanding 93,24 persen. Walaupun demikian, jika dibandingkan tahun 2016 proporsi polisi wanita sudah meningkat.

Tabel 24: Jumlah Polisi menurut Jenis kelamin di Kabupaten Sleman, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	2016 *)		2017	
	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	122	6,15	125	7,25
Laki-laki	1861	93,85	1723	93,24
Jumlah	1983	100,00	1848	100,00

Sumber: Mapolres Sleman
Keterangan: *) Angka Revisi

Peran perempuan pada lembaga peradilan di Kabupaten Sleman juga masih relatif sedikit. Jumlah hakim, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama masih didominasi oleh hakim laki-laki.

Hakim perempuan pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2017 hanya ada sebanyak 8 hakim atau 38,10 persen dari seluruh hakim yang ada. Persentase ini meningkat dibanding dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 36,36 persen. Meskipun persentase meningkat, jumlah hakim perempuan di Pengadilan Negeri Sleman masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 8 orang.

Tabel 25: Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Sleman menurut Jenis Kelamin, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	2016		2017	
	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	8	36,36	8	38,10
Laki-laki	14	63,64	13	61,90
Jumlah	22	100,00	21	100,00

Sumber: Pengadilan Negeri Sleman

Ketimpangan tidak saja terjadi di Pengadilan Negeri, hakim perempuan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman



jumlahnya juga sedikit, bahkan persentasenya lebih sedikit dibandingkan hakim perempuan di Pengadilan Negeri Sleman.

Hakim perempuan di Pengadilan Agama Sleman porsinya meningkat dibanding tahun 2016, yaitu sebesar 27,27 persen. Peningkatan persentase ini disebabkan karena meningkatnya jumlah hakim perempuan, yaitu 2 orang pada tahun 2016

Tabel 26: Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Sleman menurut Jenis Kelamin, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	2016		2017	
	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase
(A)	(C)	(E)	(D)	(F)
Perempuan	2	20,00	3	27,27
Laki-laki	8	80,00	8	72,73
Jumlah	10	100,00	11	100,00

Sumber: Pengadilan Agama Sleman

menjadi 3 orang pada tahun 2017. Selama kurun waktu 1 tahun, jumlah hakim secara total hanya meningkat 1 orang, dari 10 hakim pada tahun 2016 menjadi 11 hakim pada tahun

2017.

Selanjutnya pada Kejaksaan Negeri Sleman juga mengalami kondisi yang sama seperti lembaga penegak hukum lainnya. Porsi jumlah jaksa perempuan pada lembaga ini juga relatif sedikit

Tabel 27: Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman menurut Jenis Kelamin, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	2016		2017	
	Banyaknya	Persentase	Banyaknya	Persentase
(A)	(C)	(E)	(D)	(F)
Perempuan	11	37,93	11	39,29
Laki-laki	18	62,07	17	60,71
Jumlah	29	100,00	28	100,00

Sumber: Kejaksaan Negeri Sleman

Kondisinya hampir mirip dengan jumlah hakim pada Pengadilan Negeri Sleman. Dari 29 jaksa yang ada pada tahun 2016, 11 jaksa di antaranya adalah jaksa perempuan atau mencapai 37,93 persen. Sedangkan pada tahun 2017 proporsi jaksa perempuan meningkat menjadi 39,29 persen. Peningkatan proporsi ini disebabkan karena berkurangnya jumlah jaksa laki-laki, sedangkan jumlah jaksa perempuan tetap.



BAB IV

RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

A. Dukungan Politik dan Kebijakan Terhadap Penyelenggaraan PUG

Sebagai suatu strategi dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender pada setiap kebijakan, program dan kegiatan maka dukungan terhadap penyelenggaraan PUG khususnya di Kabupaten menjadi sangat penting. Peluang dukungan tersebut telah nampak sebagaimana termuat dalam misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman misinya yang ke 5 yaitu: ***Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.*** Dukungan lebih lanjut dari Bupati adalah melalui Keputusan Bupati Sleman Nomor: 6/ Kep. KDH/A/2017 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman. Selain dukungan dari Bupati dukungan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender juga ditunjukkan dengan disetujuinya anggaran yang responsife gender yang termuat dalam RAPBD oleh DPRD Kab. Sleman. Dukungan-dukungan tersebut amat dibutuhkan sebagai payung, karena pada hakekatnya pengarusutamaan gender (gender mainstream) bersifat *cross sector issue* yang membutuhkan keterlibatan lintas institusi/lembaga di Kabupaten Sleman.

Dengan dukungan tersebut maka yang perlu dilakukan kemudian adalah upaya untuk merealisasikan, mempercepat dan terus mengembangkan pengarusutamaan gender utamanya pada setiap kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah (PD). Hal tersebut menjadi suatu komitmen dalam mengurangi kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Sleman.

B. Kelembagaan PUG

Guna menunjang terhadap penyelenggaraan PUG maka dibutuhkan suatu kelembagaan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada evaluasi PUG di Kabupaten



Sleman. Karena lingkup PUG yang luas maka dibutuhkan suatu koordinasi dan pembagian kelembagaan PUG. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dibentuk minimal dua level kelembagaan PUG yaitu kelembagaan PUG pada tingkat Kabupaten dan Kelembagaan PUG pada tingkat Perangkat Daerah (PD).

1. Kelembagaan PUG di Tingkat Kabupaten

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka Kelembagaan dalam Pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten terdiri dari dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), tim teknis Pokja dan Focal Point.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 14 disebutkan bahwa Bupati membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui SK Bupati. Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 15 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah (PD);
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan kepala desa;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;



- f. Bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. Menyusun Profil Gender kabupaten;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten;
dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing - masing PD.

Untuk merespon hal tersebut maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 6/ Kep. KDH/A/2017 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman . Pokja dan tim teknis PUG Kabupaten sleman ini merupakan wadah konsultasi dan koordinasi lintas instansi/lembaga daerah di kabupaten Sleman. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sleman memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah (PD)
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Kepala Desa
- c. Menyusun program kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender
- e. Menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun
- f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
- g. Memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten



- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi
- i. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten
- k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Kendati upaya untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah sudah dilakukan dengan berbagai upaya, namun masih terdapat persoalan sehingga tugas dan fungsi POKJA PUG belumbisa berjalan optimal. Salah satu persoalan mendasarkannya adalah faktor lemahnya jaringan PUG yang ada pada instansi/lembaga daerah. Kapasitas dan kesadaran dari masing-masing perangkat daerah belum merata, sehingga masih ada perangkat daerah yang tidak menempatkan isu pengarusutamaan gender sebagai isu strategis dalam kebijakan, program, maupun keगतannya. Untuk itu kedepan diperlukan penguatan dukungan khususnya seluruh perangkat daerah (PD) untuk mendukung kelembagaan PUG di tingkat Kabupaten Sleman

2. Kelembagaan PUG di Tingkat Perangkat Daerah (PD)

Pelaksanaan PUG pada tingkat Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 menjadi tanggungjawab Kepala PD yang sekaligus menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 angka 13, yang disebut focal point adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.

Focal Point PUG merupakan aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Focal Point menjalankan tugas dengan



berpedoman pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011, Focal Point PD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD;

C. Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG

Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Sleman akan berjalan dengan baik bila didukung dengan Sumberdaya Manusia yang memadai. Untuk itu perlu ada upaya untuk meningkatkan keberadayaan SDM terdakai PUG baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Untuk mendukung terhadap responsifitas gender pada setiap PD maka penguasaan insrumen PUG seperti *Gender Analysis Pathaway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) menjadi satu kebuatuhan yang tidak dapat dihindari.

Untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia maka DP3AP2KB telah menyelenggarakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dalam pelatihan ini peserta mempraktikkan langsung teknik analisis gender menggunakan GAP dan GBS. Selain itu juga dilakukan pendampingan kepada PD yang menjadi pilot project, peserta dari pendampingan ini yaitu perwakilan sub bagian perencanaan dan evaluasi yang ada di PD bersangkutan. Hal ini untuk mempercepat penyebarluasan pengetahuan tentang penyelenggaraan PUG di Kabupaten Sleman. Pelatihan dan pendampingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur yang ada di PD, sehingga penyelenggaraan PUG dapat berjalan dengan optimal.



D. Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender

Ketersediaan data dan informasi gender menjadi faktor penting dalam PUG. data yang dimaksud minimal menggambarkan informasi yang terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk data yang berkaitan dengan orang atau manusia. Data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan ini akan dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan untuk merumuskan isu atau permasalahan kesenjangan gender dalam penetapan kebijakan, program maupun kegiatan pada setiap PD.

Perkembangan terakhir terkait data terpilah ini masih memiliki Sleman, khususnya terkait ketersediaan data terpilah pada setiap perangkat daerah (PD) yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan PUG. Dukungan dari PD dalam penyediaan data terpilah akan sangat membantu dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan gender. Dibutuhkan suatu petunjuk pelaksanaan/pedoman dalam melakukan merencanakan dan menyusun data terpilah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) sehingga mendukung terhadap ketersediaan sistem data dan informasi dalam PUG di Kabupaten Sleman.

E. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Sleman diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

1. Strategi Implementasi PUG Pada Tahap Perencanaan Pembangunan

Strategi Implementasi PUG pada tahap perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman secara umum dilakukan melalui:

- a. Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil;
- b. Perangkat Daerah (PD) menyusun RKPD dengan menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender;



- c. Tim driver PUG (Bappeda, DP3AP2KB, Inpektorat) Kabupaten menyusun tolok ukur dan indikator kinerja PUG;
- d. Optimalisasi komitmen perencanaan dan anggaran pembangunan responsive gender (PPRG).

2. Strategi Implementasi PG Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Strategi Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman secara umum adalah dengan memastikan bahwa :

- a. Fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervisi;
- b. Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

3. Strategi Implementasi PUG Pada Tahap Monitoring dan Evaluasi

Strategi Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Sleman secara umum adalah melalui:

- a. Pelaporan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (LAKIP) sesuai PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dari Perangkat Daerah (PD) kepada Menpan/LAN tentang kinerja aparatur; BPKP untuk akuntabilitas ; Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda dan DP3AP2KB;
- b. DP3AP2KB melakukan analisis format LAKIP sesuai PP No.8/2006 melaporkannya kepada Sektor/Lembaga sebagai *feed back* dan kepada Gubernur sebagai bentuk akuntabilitas;
- c. Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja yang responsif gender.

Pembahasan lebih lanjut tentang monitoring dan evaluasi PUG diuraikan pada sub bab huruf G.



F. Matriks Rencana Aksi dan Indikasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

No	Tema	Program	Indikator	Rumus	Satuan	Kon disi Awal 201 5	Target						Rencana Aksi	PD Penanggung Jawab
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. UMUM														
1	Penguatan Dukungan Politik dan Advokasi dalam PUG	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya dukungan politik dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui instrument kebijakan: Perda/Perbup /Surat Keputusan Bupati/Pedoman Pelaksanaan PUG	(jumlah produk kebijaka:Prda, Perbup, Keputusan Bupati, dan kebijakan lainnya)x 1 (tahun)	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	sosialisasi, advokasi, pelatihan maupun seminar untuk jajaran pemerintah Kabupaten; Rapat Koordinasi Pimpinan (RAKORPIM); dengan materi relevan Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Implementasi PUG	DP3AP2KB BAPPEDA BKPP Bagian Hukum Bagian Pemerintahan



												Penyusunan peraturanperaturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG.			
												Penyusunan pedoman pedoman tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis/SOP tentang implementasi PUG			
		Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan	Cakupan Sosialisasi dan pendidikan bagi Perempuan	Koordinasi forum peningkatan informasi perempuan	Kabupaten		1	1	1	1	1	1	Sosialisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Koordinasi	DP3AP2KB; KESBANGPOL; DINKES; FPKK	
				Sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan	orang		30	30	30	30	30	30			
				Pendidikan politik perempuan	kali		1	1	1	1	1	1			
				Pengembangankapasitas perempuan	orang		60	60	60	60	60	60			
				Sosialisasi three ends	Kali		17	17	17	17	17	17			



		Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah desa lokasi peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Jumlah desa lokasi P2WKSS	desa	24	26	28	30	32	34	35	Sosialisasi, pembinaan dan evaluasi	DP3AP2KB
													KIE perlindungan dan Pemenuhan Hak perempuan	
2	Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase Lembaga PUG aktif	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang aktif sebagai vokal point PUG dibagi jumlah Perangkat Daerah (PD) dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Mendorong adanya surat edaran Bupati kepada kepala PD tentang Pembentukan focal point PD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat PD yang ditetapkan dengan SK Kepala PD	BAPPEDA; DP3AP2KB
													Pembentukan dan penetapan focal point diseluruh PD di Kabupaten Sleman	Masing masing PD
													Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point PD dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Sleman	BAPPEDA/Driver PUG (DP3AP2KB, Inspektorat, DPKAD)



												Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG.	BAPPEDA; DP3AP2KB
												Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender	
												Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di tingkat Kecamatan dan Desa	DP3AP2KB; Desa; Kecamatan
												Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kabupaten Sleman yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat	DP3AP2KB
												Optimalisasi layanan penanganan pengaduan, layanan psikologi, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, layanan reintegrasi sosial	DP3AP2KB
												Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	
												Layanan terhadap perempuan korban kekerasan	
												jumlah perempuan korban tindak kekerasan yang terlayani dibagi kasus yang dilaporkan dikalikan 100%	
												%	
												100	
												100	
												100	
												100	
												100	
												100	



3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia/Organisasi PUG	Pembinaan organisasi perempuan	Optimalisasi Peran Organisasi Perempuan	Pembinaan lembaga organisasi perempuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	kali	12	12	12	12	12	12	12	Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan serta memperingati hari istimewa bagi perempuan	DP3AP2KB
				Pembinaan lembaga organisasi perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	kali	12	12	12	12	12	12	DP3AP2KB; PD		
				Peringatan Hari Kartini	kali	1	1	1	1	1	1			
				Peringatan Hari Ibu	kali	1	1	1	1	1	1			
				Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	kali	6	6	6	6	6	6			
		Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Peningkatan kapasitas peran serta gender dalam pembangunan	Bimtek, evaluasi, review PPRG	orang	80	90	100	110	110	110	110	Pendidikan, bimbingan teknis, sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan evaluasi peran serta gender dalam pembangunan	DP3AP2KB, PD, BAPPEDA
				Pendidikan bagi perempuan calon BPD dan pengenalan Musrenbang bagi	orang	40	40	40	40	40	40	40		



			perempuan									
			Pengembangan kapasitas tim PUG (driver PD PUG)	kali	1	1	1	1	1	1	1	TIM DRIVER PUG, DP3AP2KB
			FGD PUG, sosialisasi upaya percepatan PUG dan keluarga sadar gender	kali	2	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB, PD, KECAMATAN DESA
			Sarasehan perempuan disabilitas	kali	1	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB, DINAS SOSIAL
			Forum PUG ormas agama	kali	1	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
			Sosialisasi UU/Perda terkait perempuan dan penguatan gugus tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	kali	30	30	30	30	30	30	30	DP3AP2KB, DRIVER PUG, GUGUS TUGAS TPPO, APH
			Evaluasi Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)	kali	1	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL



4	Peningkatan Sistem Data dan Informasi Gender	Program Pengembangan data/informasi untuk perencanaan	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	Jenis data perencanaan pembangunan yang tersedia dibagi jenis data perencanaan pembangunan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dikali 100%	%	40	60	65	65	70	75	80	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	PD, DP3AP2KB, BAPPEDA, KOMINFO
													Updating data SIPD Kabupaten sleman	
													Updating data SIPD Bangda kemendagri	
		Program pengembangan data/informasi statistik	Meningkatnya kualitas data statistik gender	Data indeks pembangunan manusia	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	penyusunan buku IPM dan UPG
				Data indeks pembangunan gender	dokumen	1	1	1	1	1	1	1		
				Data pilah Gender	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Penyusunan buku profil, data pilah gender tingkat kabupaten, kecamatan dan desa	BPS; DP3AP2KB; PD; SETDA; Driver PUG; Kecamatan; Desa
B. BIDANG-BIDANG RENCANA AKSI DAERAH PUG														
1	Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Jumlah siswa SD/MI, SMP/MTs,	APK SD/MI (%)	116.81	100	100	100	100	100	100	Pemberian beasiswa bagi siswa	DINAS PENDIDIKAN



		Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah	dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	SMA/SMK/MA dan jumlah siswa usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dikali 100%	APK SMP/MTs (%)	111.7	100	100	100	100	100	100	kurang mampu untuk jenjang Pendidikan SD; SMP/MTs baik laki-laki maupun perempuan secara seimbang	
					APK SMA/SMK/MA (%)	88.69	88.7	88.8	88.9	88.10	88.11	88.12	Penyediaan bantuan operasional daerah (BOSDA)	
					APM SD/MI (%)	103.2	100	100	100	100	100	100	Penyelenggaraan paket A dan B	
					APM SMP/MTs (%)	83.96	83.97	83.98	83.99	83.100	83.101	83.102		
					APM SMA/SMK/MA (%)	58.95	58.96	58.97	58.98	58.99	58.100	58.101		
		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman;	Jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman dibagi jumlah seluruh lembaga pendidikan non formal dan informal (PNFI) dikalikan 100%	%	68.1	74	75.25	76	77	78	80	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Pelatihan Lembaga; Uji Kompetensi Peserta Didik Nonformal dan pengiriman peserta PKBM dan LKP; Pembinaan Organisasi Mitra (Forum PKBM, HIPKI, Forum PAUD	DINAS PENDIDIKAN; DINAS KEBUDAYAAN



			angka melek huruf di kabupaten sleman	Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikalikan 100%	%	98.6	99.03	99.04	99.05	99.06	99.07	99.08	Pembinaan Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional	
			Terbentuknya desa berkarakter	Jumlah desa berkarakter	Desa	0	0	4	6	9	13	17	Pendidikan Kecakapan Hidup bagi masyarakat Penganggur Usia Produktif; pagelaran dan pertunjukan budaya daerah	
			Presentase minat baca masyarakat	Jptb dibagi Jpts dikalikan 100%	%	55.85	56.91	57.22	57.31	57.85	58.18	58.63	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	
	Program pendidikan berwawasan gender		Meningkatnya cakupan orang dan lembaga yang terlibat dalam pendidikan berwawasan gender	workshop satuan pendidikan berwawasan gender	Orang	42	42	42	42	42	42	42	sosialisasi, workshop, pelatihan gender bagi sekolah/stuan pendidikan, guru dan siswa.	DINAS PENDIDIKAN
			Pelaksanaan implementasi satuan pendidikan berwawasan gender	satuan pendidikan	14	14	14	14	14	14	14			



2	Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Kesehatan	(Jumlah enduduk yang ikut jaminan kesehatan di JKN Jamkesda dibagi jumlah penduduk) dikalikan 100%	%	73.52	74	77	79	82	85	88	Layanan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan; Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan; Peningkatan pemahaman dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan: Peningkatan pemahaman ibu hamil tentang penyakit bawaan kelahiran (jantung, diabetes, pre eklamsia dan eklamsia); Peningkatan kualitas kelas ibu hamil; Peningkatan kualitas PONEK dan PONEK	DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT
			Menurunnya AKI	Jumlah kasus kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000	per 100.000 kelahiran hidup	28.30	63.23	62.79	55.42	55.04	47.83	47.51		
			Menurunnya AKB	Jumlah kasus kematian bayi (berumur <1 tahun) di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100	per 1000 kelahiran hidup	3.61	4.43	4.33	4.23	4.13	4.03	3.94		



		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Status balita gizi buruk	Jumlah balita dengan status gizi kurang berdasarkan indeks BB/U (Z-skore-2 SD)/jumlah balita yang ditimbang di psyandu di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%	%	0.4	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.4	penanggulan gan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	DINAS KESEHATAN
			Cakupan balita pendek dan sangat pendek	Jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek berdasarkan indeks TB/U (Z skore 2SD)/ jumlah balita yang ditimbang di psyandu di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%	%	12.86	12.6	12.4	12	11.5	11.2	11	pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	DINAS KESEHATAN



		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian penyakit menular	Jumlah kasus KLB yang ditangani <24 jam di suatu wilayah dalam satu tahun dibagi jumlah seluruh kasus KLB di suatu wilayah dalam satu tahun dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan pemahaman remaja tentang bahaya HIV AIDs; Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam HIV AIDs pemeriksaan CD4; Pemeriksaan serologi Antraks dan pes, Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2), Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes; Pelayanan Imunisasi, Pengendalian dan penanganan DB; Konsultasi klinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi SITT onlineoffline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	DINAS KESEHATAN
--	--	--	-------------------------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----------------



			Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Pos Pembina Terpadu (Posbindu) PTM (Penyakit Tidak menular) dibagi jumlah desa yang ada dikalikan 100%	%	68.6	69	70	80	90	90	90	Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan narkoba; Peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan minum obat (DOTS)	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	desa	4	6	8	10	12	14	16	Pembinaan desa yang telah diorientasi HIV / AIDS; Orientasi Desa Sadar HIV / AIDS	DP3AP2KB
3	BIDANG KEGIATAN EKONOMI	Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Optimalisasi ekonomi perempuan	Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP)	kali	2	2	2	2	2	2	2	peningkatan kapasitasperempuan dalam usaha produktif; Pemberdayaan masyarakat desa	DP3AP2KB; Kecamatan; Desa; TP PKK
				Desa Prima	desa	14	15	15	19	21	21	21		
				Industri Rumahan	desa	6	6	6	10	14	14	14		
				Sekolah Ibu/sekolah Jumat	kali	1	1	1	1	1	1	1		
				PUPM	Kecamatan	4	5	6	7	7	7	7		



		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa rawan pangan yang sudah diintervensi pada tahun yang bersangkutan terhadap jumlah desa rawan pangan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; Penanganan daerah potensi rawan pangan; Laporan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN; DP3AP2KB
	Persentase cadangan pangan		Jumlah cadangan pangankabupaten pada tahun yang bersangkutan dibagi 100 ton dikali 100%	%	27.86	60	70	80	90	100	100	Pembinaan KWT Pengelola P2KP; Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		
	Persentase Pola Pangan Harapan		Jumlah persentase kalori masing-masing kelompok pangan pada tahun yang bersangkutan dikalikan pembobotan masing-masing kelompok pangan dikalikan 100%	%	85.5	86.5	87.5	88	88.5	89	89.5			



		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk	Banyaknya BUMDES yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan	BUMDES	10	17	20	23	25	28	35	pembinaan kelompok penerima penguatan modal; Penguatan modal Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan, Ketahanan Pangan, Penyuluhan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN, PERINDAGKOP, KBPMPP
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausahawan baru pada tahun yang bersangkutan	Wirausahawan baru	100	105	115	125	135	140	145	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; Pembinaan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya Jumlah Kelompok PMKS aktif	jumlah kelompok PMKS aktif pada tahun yang bersangkutan	Kelompok PMKS aktif	145	150	155	165	170	185	200	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KECIL DAN MENENGAH; DINAS SOSIAL
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi terbentuk per tahun	Jumlah koperasi yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan	koperasi	6	10	10	10	10	10	13	Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah; Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma yang dilibatkan dalam kegiatan ekonomi	Jumlah disabilitas dan trauma yang ditangani dibagi jumlah disabilitas dikalikan 100%	%	65	70	70	75	75	75	75	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, melalui: Pelatihan kerja non inst. Sub kejuruan Tata Boga dan Bordir	DINAS TENAGA KERJA; DINAS SOSIAL



		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pendaftar pelatihan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100%	%	68.3 3	68.3 3	70	70	75	75	75	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja non institusional; Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui pelatihan swadana	DINAS TENAGA KERJA
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dikali 100%	%	70	70	75	80	85	90	90	Pengembangan Padat Karya; Pembinaan Usaha ekonomi bagi pekerja ter-PHK; Pengembangan Pemberdayaan TKM dan TKS; Peningkatan kesetaraan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan	DINAS TENAGA KERJA



		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase konflik yang ditangani	Jumlah konflik ketenagakerjaan yang tertangani denan baik dibagi jumlah konflik ketenagakerjaan yang dilaporkan dikali 100%	%	85	100	100	100	100	100	100	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan; Penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA
4	Bidang Kependudukan dan KB	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah KK yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) di bagi jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah sampai dengan tahun (x) dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan; Optimalisasi layanan akte kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga bagi masyarakat miskin dan rentan; Koordinasi dan fasilitasi pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pngesahan anak; Koordinasi dan fasilitasi pelaporan perkawinan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL; KECAMATAN; DESA
			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	Jumlah wajib KTP yang memiliki KTP elektronik sampai dengan tahun (x) dibagi jumlah wajib KTP sampai dengan tahun (x) dikali 100%	%	99.1 7	99.2 3	99.3 2	99.3 9	99.4	99.4 5	99.5		



			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang lahir di tahun (x) dibagi jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun (x) dikalikan 100%	%	87	88	89	90	91	91	92		
			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan bagi yang mati pada tahun (x) dibagi jumlah kematian penduduk Sleman yang terjadi pada tahun (x) dikalikan 100%	%	88	56	58	62	65	70	72		
	Program Keluarga Berencana		Angka prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dikalikan 100%	%	79.14	79.2	79.25	79.3	79.35	79.4	79.5	Pelayanan KIE, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; Pelayanan konseling KB; KIE mengenai pentingnya KB bagi kaum laki-laki	DP3AP2KB
			Total Fertility Rate (TFR)	TFR= $5 \sum_{i=1}^7 =_1$ ASFR. AFSR= Angka kelahiran menurut kelompok umur. i= kelompok umur	angka per 1000 penduduk perempuan	2.1	2	2	2	2	2	2		



		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun	Jumlah pasangan usia subur (PUS)<20 tahun dibagi jumlah PUS dikalikan 100%	%	0.63	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	DP3AP2KB
		Program Layanan Kontrasepsi	Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD);	Jumlah PPKBD	Orang	86	86	86	86	86	86	86	Penyelenggaraan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
			Persentase KB pria	Jumlah peerta KB Pria dibagi KB aktif dikalikan 100%	%	8.2	8.25	8.28	8.3	8.35	8.4	8.5	Layanan KB Untuk laki-Laki	



		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase capaian KB mandiri	Jumlah peserta KB melalui fasilitas kesehatan jalur swasta dibagi PUS aktif dikalikan 100%	%	80	80.0 2	80.0 3	80.0 4	80.0 6	80.0 8	80.1 0	Pengembangan jaringan kerja Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP); Pembinaan Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Evaluasi kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
5	Bidang Partisipasi Perempuan dalam politik	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades	Jumlah masyarakat (perempuan) yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT dikalikan 100%	%	76.7 5	77	77	77	78	79	79	Dialog pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM; Seminar peningkatan partisipasi perempuan dalam politik 30%	BADAN KESBANGPOL; DP3AP2KB, KPUD



6	Bidang Sosial dan perlindungan perempuan dan anak	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	Panjang jalan evakuasi baik/jumlah panjang jalan evakuasi ditambah jumlah barak pengungsian kondisi baik dibagi jumlah barak pengungsian ditambah jumlah EWS kondisi baik dibagi seluruh EWS dikalikan 100%	%	55.81	61	63	67	71	75	78	Pembelihararaan dan pengembangan saran dan prasarana kebencanaan ; Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana; Pembinaan penanggulangan bencana terhadap kelompok rentan (perempuan, anak dan lansia); Penyiapan sarana prasarana kebencanaan responsif perempuan, anak dan lansia; Pembinaan keterampilan kebencanaan dan pembentukan komunitas peduli bencana	DINAS SOSIAL; BPBD DP3AP2KB; Kecamatan
			Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	Akumulasi jumlah peserta gladi lapang ditambah jumlah peserta pelatihan pertolongan ditambah jumlah peserta pengelolaan dapur umum dan ditambah jumlah peserta pelatihan pengelolaan barak	orang	N/A	6.828	7.688	8.548	9.408	10.268	11.128		
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang tertangani dibagi jumlah orang terlantar dikalikan 100%	%	90	90	90	90	90	90	90	90	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja; Pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar



			Kelompok PMKS yang aktif	Akumulasi jumlah kelompok PMKS yang aktif	Kelompok	145	150	155	165	170	185	200	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani dibagi kasus yang dilaporkan dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelatihan pendampingan, konseling korban KDRT, Pencatatan dan pelaporan KDRT; Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan korban kekerasan; Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan PD dan lembaga penegak hukum; Monitoring, evaluasi dan Pelaporan penanganan korban KDRT; Optimalisasi layanan UPTD PPA	DP3AP2KB



		Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Psikoedukasi	kali	15	15	15	15	15	15	15	sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan; pelatihan penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP3AP2KB
	Meningkatnya pemahaman bagi korban akan pentingnya komunikasi yang baik dengan pasangannya		Pelatihan komunikasi efektif	kali	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Pembekalan teknis pendampingan korban		kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik	Jumlah prasarana air baku yang terkelola dengan baik dibanding dengan total jumlah prasarana penyediaan air baku di kab. Sleman dikali 100%	%	60	65	70	75	80	85	85	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air Pembuatan penampungan dan saluran air bersih	SDAEM	



7	Bidang Infrastruktur Dasar	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolahan air limbah terpusat	Jumlah rumah yang terlayani IPAL Komunal dibagi jumlah rumah Kab. Sleman dikali 100%	%	2.75	2.88	3	3.25	3.5	3.75	4	Layanan air bersih bagi masyarakat meningkat; Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum: Pelatihan Perpamdes, Pendataan Perpamdes, Lomba Perpamdes, Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan, dan Pembinaan Air Minum Kabupaten; Pembinaan dan Fasilitasi sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat	BLH; DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWAWAN PERMUKIMAN; PDAM
				Jumlah rumah yang tersambung SR dibagi jumlah rumah dilokasi sambungan dikali 100%	%	4.5	4.59	5.49	6	6.5	7	8		
			Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih perpipaan PDAM dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%	%	11	19.5	20	20.1	20.5	21	21		
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni meningkat	Jumlah rumah layak huni KK miskin dibagi jumlah rumah KK miskin dikali 100%	%	97.96	98	98.25	98.5	98.75	99	97.25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa / Rusunami; Pengelolaan Rusunawa/Rusunami; Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWAWAN PERMUKIM	



			Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah halte dibagi total kebutuhan dikalikan 100%	%	74	75	76	77	78	79	80	Zona Selamat Sekolah; Pagar pengaman Jalan; Pembuatan pojok laktai di terminal maupun sarana perhubungan lainnya	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana publik dan Perhubungan	Persentase ruang laktasi layak pada gedung layanan publik di Kab. Sleman	Jumlah gedung layanan publik yang memiliki ruang laktasi layak dibagi seluruh gedung layanan publik dikali 100%	%	5	10	15	20	25	30	35	koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk memberikan prioritas penyediaan ruang laktasi pada gedung layanan publik di Kab. Sleman	PD; Kecamatan, Desa



G. Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Monitoring

a. Umum

Secara umum monitoring menurut WHO adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi. Menurut Suzanne Blogg terdapat beberapa perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kapan monitoring dan evaluasi dilakukan, apa yang diukur, siapa saja yang terlibat, sumber informasi, pengguna dan juga penggunaan hasil.

Sedangkan Connor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Monitoring juga digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumberdaya, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai bisa efektif dan efisien.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: (1) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan, (2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, (3) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program. Menurut Connor ada delapan macam kegunaan monitoring yaitu :

- 1) Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka



meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program.

- 2) Monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan.
- 3) Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana.
- 4) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan.
- 5) Monitoring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana.
- 6) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.
- 7) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
- 8) Monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.

Pelaksanaan monitoring dalam prosesnya membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan dilaksanakan. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program.

Proses monitoring dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menyusun rancangan monitoring, seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola



untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrument monitoring, e) waktu dan jadwal kegiatan monitoring, dan f) biaya monitoring.

Kedua, melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. *Ketiga*, menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program.

b. Monitoring Responsif Gender

Monitoring responsif gender di Kabupaten Sleman dapat dilakukan melalui monitoring terhadap perencanaan pembangunan responsive gender dan monitoring penganggaran responsive gender.

Pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan dengan mengamati dan menghimpun informasi berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan issue strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran monitoring perencanaan yang responsif gender adalah proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Monitoring perencanaan responsif gender pada RPJMD dan RKPD dilakukan oleh tim Pokja PUG, sedangkan monitoring perencanaan responsive gender pada



internal Perangkat Daerah (PD) dilakukan oleh Focal Point Perangkat Daerah

Sedangkan monitoring penganggaran responsif gender merupakan upaya pengamatan dan penilaian terhadap proses penyusunan anggaran yaitu mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran responsive gender adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring terhadap RKA dilakukan oleh Focal Point sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam monitoring terhadap Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh SKPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Dibawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Dalam konteks penganggaran responsive gender untuk memudahkan pelaksanaan monitoring, maka dibuat instrument monitoring yang dapat membantu dalam menjaga arah dari



monitoring tersebut. Pada umumnya instrument monitoring yang dibuat dapat terdiri dari tiga instrumen yaitu instrument monitoring perencanaan ARG Tahap Perencanaan; Instrumen ARG Tahap Pelaksanaan; dan Instrumen Monitoring ARG tahap pertanggung jawabah.

Instrumen Monitoring ARG Tahap Perencanaan

Monitoring terhadap proses penganggaran Responsif gender diawali pada tahap perencanaan yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Anggaran Responsif Gender dilengkapi dengan analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* dan *Term of Reference (TOR)*. Oleh karena itu pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus Monitoring anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference (TOR)*, *Gender Budget Statement (GBS)*. Bentuk dari instrument ARG tahap perencanaan dapat mengacu pada contoh instrumen dibawah ini:

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
		Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		Apakah kegiatan/sub kegiatan tersedia dokumen GBS?			
		Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
		Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
		Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		Apakah tujuan kegiatan dalam dalam			



		RKA/TOR berhungan dengan hasil (outcome) pada RKA?			
		apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			

Catatan: Tabel instrument diatas hanya merupakan contoh dan bersifat opsional. Perangkat Daerah (PD) maupun driver PUG dapat memiliki memilih menggunakan model yang paling mudah diadaptasi dan paling sesuai dengan kondisi yang ada.

Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus monitoring adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen-dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan. Bentuk dari instrument ARG tahap pelaksanaan dapat mengacu pada contoh instrument sebagai berikut:

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>input</i> RKA ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>output</i> RKA ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>outcome</i> RKA ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			

Catatan: Tabel instrument diatas hanya merupakan contoh dan bersifat opsional. Perangkat Daerah (PD) maupun driver PUG dapat memiliki memilih menggunakan model yang paling mudah diadaptasi dan paling sesuai dengan kondisi yang ada.



Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dimonitor adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender. Bntk dari instrument ARG tahap pertanggungjawaban dapat mengacu pada contoh sebagai berikut:

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
		Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
		Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
		Apakah alokasi anggaran yang teredia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi.?			

Catatan: Tabel instrument diatas hanya merupakan contoh dan bersifat opsional. Perangkat Daerah (PD) maupun driver PUG dapat memiliki memilih menggunakan model yang paling mudah diadaptasi dan paling sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Evaluasi

a. Umum

Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai *“The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*. Artinya evaluasi



merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternative keputusan. Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu objek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks objek tertentu dan fungsi evaluasinya.



Berkaitan dengan tujuan evaluasi, Anderson (1978) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut:

- 1) Memberi masukan untuk perencanaan program
- 2) Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program
- 3) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat
- 4) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian

Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: *pertama*, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. *Kedua*, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan *ketiga*, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

b. Evaluasi terhadap Penganggaran Responsif Gender

Rencana pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memastikan apakah rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun rencana monitoring dan



evaluasi dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Komponen Evaluasi	Total Jawaban	
			Ya	Tidak
1	2	3	4	5
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		Pertanggungjawaban		
Total Keseluruhan				

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 isi dengan nama unit organisasi Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender
3. Kolom 4 isi dengan jumlah jawaban “YA” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.
4. Kolom 5 isi dengan jumlah jawaban “TIDAK” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.

No	Nilai Variabel	Kriteria Penilaian
1	15 – 20	Responsif Gender
2	8 – 14	Kurang Responsif Gender
3	1 – 7	Tidak responsif Gender

Catatan: Tabel instrument diatas hanya merupakan contoh dan bersifat opsional. Perangkat Daerah (PD) maupun driver PUG dapat memiliki memilih menggunakan model yang paling mudah diadaptasi dan paling sesuai dengan kondisi yang ada.



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi pengarustamaan gender. Hal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sekaligus menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman misinya yang ke 5 yaitu: ***Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.***

Dengan adanya RAD PUG di Kabupaten Sleman ini maka setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Namun demikian perlu disadari bahwa upaya integrasi perspektif gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah lepas dari tantangan. Tantangan tersebut bisa muncul dalam hal pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Oleh sebab itu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan menjadi mutlak dibutuhkan agar RAD PUG ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan RAD PUG di kabupaten Sleman, maka terdapat kaidah umum pelaksanaan sebagai berikut:

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja Perangkat Daerah (PD).



2. Pemerintah Kabupaten Sleman (Seluruh PD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sleman wajib mendukung pelaksanaan RAD PUG ini dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG wajib dilakukan oleh tim driver PUG Kab. Sleman yang sudah dibentuk untuk memaksimalkan efektivitas.
4. RAD PUG Kabupaten Sleman ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sleman. Selain itu jika terjadi perubahan peraturan Perundang-undangan ataupun perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap RAD ini.

Akhirnya dengan disusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan PUG di Kabupaten Sleman ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua *stakeholder* maupun pihak terkait dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Sleman.

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

